

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ketika Kota Makin Kaya, Desa Makin Miskin

Ketika Kota Makin Kaya, Desa Makin Miskin

SUDAH lama desa menyubsidi kota. Sumber daya desa diperas untuk orang-orang kota.

Banyak anak-anak desa yang disekolahkan ke kota. Para orang tua menyekolahkan anak dengan hasil pertanian. Begitu selesai disekolahkan, mereka memilih bekerja di kota.

Saat menikah, orang tua yang tinggal di desa tetap harus menyubsidi, ikut membiayai pernikahan. Ada beragam cara, dari mulai menjual sapi sampai memotong pohon jati. Sebagian lagi kalau perlu berutang dengan cara menggadaikan sawah dan kebun.

Belum cukup sampai disitu. Saat anak-anak desa yang tinggal di kota butuh rumah, sering pula merecoki orang tua. Bagi yang merasa punya hak waris, bagian dari harta warisan berupa sawah atau kebun dijual untuk membayar persekot rumah di kota. Hanya cicilannya yang mereka tanggung.

Ketika orang tua mereka tak punya lagi aset yang cukup untuk menyokong hidup di kota, kadang masih dibebani dengan diminta datang ke kota untuk ngemong cucu sementara mereka sibuk bekerja, membayar cicilan rumah, mobil, tagihan kartu kredit, dan lain-lain.

Pelajaran sosial dalam relasi desa-kota ini terjadi saat krisis menerjang Indonesia. Pada 1998, karena krisis moneter, banyak kota yang tak punya pekerjaan. Sebagian dari mereka memilih mudik untuk menitipkan badan supaya "dipelihara" oleh kampung halaman. Sebagian lagi tetap tinggal di kota tapi disubsidi dengan berbagai cara oleh desa. Dari mulai dikirim beras sampai uang

Sedangkan orang-orang kota itu, mereka menatap desa dengan perasaan nostalgia belaka. Kalau sedang stres, liburan di desa. Namun tatapannya adalah tatapan orang kota. Desa dianggap jumud. Gitu- gitu saja. Tidak maju-maju. Konsep maju yang dimaksud tentu saja maju ala orang kota.

Ketika kemudian menua, mereka tetap ingin tinggal di kota. Hanya saja, daya dukung sudah tidak sekuat dulu lagi. Uang pensiun tak seberapa. Aset hanya secukupnya. Sementara biaya hidup di kota makin mahal. Tidak mudah pula menurunkan gaya hidup saat masih bekerja. Satu per satu aset dijual untuk membiayai hidup. Mobil yang awalnya dua, dijual satu per satu. Rumah yang awalnya dua, dijual satu per satu. Begitu habis semua, pulang ke desa.

Tua. Tak lagi berdaya. Pulang ke kampung halaman dengan kondisi semua aset yang dimiliki orang tua sudah tandas. Habis. Kehidupan yang tinggal sisa-sisa. Kota makin kaya. Desa makin miskin.

Akan tetapi, kita harus tetap punya harapan. Setidaknya kita harus membereskan cara pandang atas relasi desa-kota. Ketika panen cengkeh, tembakau, kakao, pala, kopi, ikan, dan komoditas lain, maka pahami itu semua sebagai instrumen untuk "mengembalikan" uang dari desa yang diserap ke kota.

Jangan mudah teriak kalau harga beras tinggi, harga cabai tinggi, asal pemerintah tidak mudah mengeluarkan kebijakan impor, anggap itu saatnya siklus orang kota menyubsidi balik orang desa. Jangan mudah melarang-larang rokok. Ada satu juta hektar lebih lahan petani cengkeh di seluruh Indonesia. Ada hampir 10 juta petani tembakau punya uang tahunan saat panen tembakau. Jangan bilang bahwa komoditas mereka mudah dialihkan. Kalian ini siapa?

Kalian mau tebangi pohon-pohon cengkeh yang berusia puluhan tahun itu? Yang sudah menyubsidi jutaan anak Indonesia untuk sekolah dan menjadi kelas menengah. Begitu menjadi kelas menengah, tiba-tiba jadi Malin Kundang atas kehidupan orang tua dan desa mereka.

Petani-petani tembakau itu, tak usah diajari lagi. Jika ada komoditas yang lebih mahal dan legal, pasti mereka beralih dengan sendirinya. Tidak perlu kalian ajari dengan bahasa yang klise: bisa dialihkan. Sementara kamu tak pernah pegang tanah dan cangkul

Jangan haramkan mudik Lebaran. Karena itu juga siklus untuk membawa sementara uang kota ke desa. Jutaan orang yang mudik itu bukan hanya menjalankan ritus agama tapi juga perilaku ekonomi yang sehat.

Tapi ya jangan kebangetan. Pulang bawa uang satu juta, balik ke kota, bawa ayam lima, kelapa, pisang, sampai mobil penuh.

Tapi tidak apa-apa. Kasih orang tua kepada anak sepanjang jalan. Kasih desa kepada kota sepanjang zaman.

Hanya saja, mari terus tanamkan di kepala kita, harus diperbanyak cara agar hubungan desa-kota menjadi lebih sehat. Setiap ingin melakukan tindakan ekonomi-politik, pikirkan dampaknya pada relasi itu. Jangan terlalu timpang. Jangan kota terlalu kaya dengan cara memeras.

Sebetulnya, kita punya harapan bahwa ketimpangan ini mulai diperhatikan juga oleh pemerintah. Ada Nawacita. Membangun dari pinggiran. Ada dana desa yang terus dialirkan. Keduanya adalah hal yang sangat baik.

Hanya saja, perlu kembali dipastikan, jangan sampai uang itu kembali ditarik paksa ke kota. Orang-orang kota yang memenangi tender pembangunan infrastruktur. Pendamping-pendamping desa punya cakrawala berpikir yang luas. Jiwa relawan yang hanya menatap dengan cara kota.

Sudah saatnya kita menyeimbangkan dan menyehatkan relasi antara desa-kota. Jangan hanya pulang kampung saat sudah tak berdaya dan renta. Sebab ibarat negara ini sebuah kendaraan, bahan bakar dan pelumasnya adalah sumber daya desa.

O ya, terus kalau berwisata ke desa, jangan lupa bahwa di alam yang sedang Anda nikmati itu ada manusianya. Manusia desa. Jangan pernah berpikir menikmati pasir bersih, ombak berbuih, laut biru, dengan ilusi ingin menyingkirkan manusia dari mata kota Anda.

Menatap sawah yang hijau, pegunungan yang sejuk, kopi yang lezat, tanpa pernah berpikir berapa harga yang pantas untuk menikmati itu semua.

Jangan pernah merasa bangga membeli murah produk apa pun dari desa.

Lampiran 2. Menjadi Manusia di Smoking Area

Menjadi Manusia di Smoking Area

BANDARA adalah tempat tersibuk dan bergegas. Orang-orang berjalan dengan mata lurus, langkah tegap, sambil mencangklong tas atau menggeret koper. Kebanyakan wajah mereka diam, dingin, dan wangi. Hanya sedikit yang terlihat rileks. Bre Suara pengumuman entah untuk jadwal keberangkatan, keterlambatan, dan panggilan orang, diudarkan dengan datar.

Suara perempuan itu mirip robot. Mungkin memang robot. Mekanis. Merdu tapi hambar.

Etalase-etalase tampak gemerlap. Harga barang rata-rata naik dua kali lipat. Lampu-lampu terlihat mewah, desain interior kelihatan mahal. Namun kesan kaku tetap tak bisa dilepaskan.

Bandara punya kesan dari ujung ke ujung, lorong ke lorong: dingin, kaku, mewah, bergegas. Tanpa emosi.

Namun, ada satu oase yang membuat semua pudar, mencair, rileks; jika kita masuk ruang smoking area. Wajah-wajah kembali ekspresif. Wajah manusia.

Di smoking area orang bertegur sapa, berkomunikasi, meminjam korek, bertanya hendak ke mana, kalau sudah mulai akrab berkisah tentang bisnis mereka, mengomentari tayangan-tayangan di layar televisi, berseloroh, kadang ada perdebatan kecil. Di ruangan yang sering diplesetkan sebagai 'burning area' karena tempatnya yang sengaja dibuat sangat kecil sehingga penuh asap, mereka tampil dengan melepaskan semua atribut. Tidak peduli direktur atau karyawan, selebritas atau wartawan, intelektual atau budayawan, semua membaur.

Di ruangan itu, seorang direktur yang tidak kebagian tempat duduk tidak merasa harus dipersilakan duduk oleh orang lain. Biasa saja. Orang-orang berjas dan berdasi tidak lebih istimewa dibanding orang-orang berkaos dan bercelana jins.

Di negeri ini ada keganjilan yang nyaris tidak masuk akal. Para perokok yang berdesakan di smoking area itu mengonsumsi barang legal dengan cukai yang sangat tinggi. Namun, mereka diperlakukan seperti para paria, interniran, kriminal, dalam sebuah 'burning area' yang sempit dan sesak.

Bukankah dengan cukai yang mereka beli, seharusnya justru para perokok diberi tempat yang nyaman? Y

Akan tetapi, setiap upaya yang menggencet selalu ada yang justru menguat. Seperti yang bisa kita saksikan di dua tempat yang berbeda di sebuah bandara. Lihatlah ruang lapang non-smoking area. orang-orang yang diam, menekuk kepala, sibuk dengan gawai, tidak pernah melirik teman sebangku, apalagi berbincang.

Lalu alihkan pandangan Anda ke smoking area: mereka saling berinteraksi, dari mulai pinjam korek api sampai berbincang tentang bisnis dan tayangan televisi.

Di smoking area, mereka kembali menjadi manusia.

Lampiran 3. Guru Mencubit Berdiri, Murid Bandel Berlari, Kita Mencibir Bangga Sekali

Guru Mencubit Berdiri, Murid Bandel Berlari, Kita Mencibir Bangga Sekali

Sudah berkali-kali ada guru dilaporkan orang tua wali murid dengan tuduhan tindak pidana kekerasan. Dunia maya bergerak. Terbelah dua. Sebagian membela para guru. Sebagian lagi membela orang tua wali murid.

Bagi yang membela orang tua wali murid, mereka mengatakan bahwa bukan begitu cara guru dalam mendidik anak. Bahkan ada selebtwit yang langsung ngetwit: “Gua belum pernah mencubit atau menjewer anak gua, kalau anak gua disentuh sama gurunya, gua lapor polisi. Peduli amat.”

Sementara yang membela guru, juga tak kalah kerasnya. Sebagian bilang begini, “Kalau semua ‘kejahatan’ anak dilaporkan balik ke polisi, penjara bakal penuh. Tawuran dilaporkan. Menyontek dilaporkan. Merusak fasilitas publik seperti mencoret-coret meja, kursi, dan tembok sekolah juga dilaporkan. Tapi para guru memilih tidak melaporkan ke polisi.”

Ada juga yang bilang, “Kalau gak mau dijewer guru ya didik saja sendiri anakmu.”

Perdebatan jadi seru tapi makin nggak bermutu. Lebih banyak gula daripada kopinya.

Kita semua pasti menginginkan hal ideal dalam hidup ini. Tapi kenyataan tidak selalu begitu. Banyak cewek yang menginginkan punya pacar seperti Agus Mulyadi: pintar, baik hati, rajin salat, dan lucu sekali. Tapi Agus hanya sanggup pacaran dengan satu cewek. Pahit, bukan? Lalu yang lain ya pacaran dengan cowok seadanya di dekat mereka.

Jadi, kalau kamu jadian sama cewek, jangan bangga dulu. Jangan-jangan sebetulnya cewekmu itu sebetulnya suka sama Agus. Tapi Agus sudah mendapatkan cewek yang ideal menurutnya.

Dalam pendidikan, idealnya, ada 3 pihak yang ‘wajib’ mendidik anak: Orang tua, komunitas, dan sekolah. Sekali lagi bukan hanya sekolah lho ya... Ingat itu. Camkan. Sebab seorang anak itu hasil perkentuhanmu. Maka carilah semua konsep pendidikan baik dari kitab-kitab suci maupun lontar dan lontara, selalu orang tua yang wajib duluan mendidik anak.

Sekolah bukan tempat penitipan anak. Sekolah adalah representasi hadirnya negara yang berkewajiban memfasilitasi pendidikan warganya. Jangan dibolak-balik ya, Maliiih...

Idealnya, tidak ada kekerasan apa pun di dalam proses belajar-mengajar. Sebagaimana idealnya tidak ada orang yang melanggar lampu merah di jalanan. Tidak ada yang jomblo di Indonesia karena persentase laki-laki dan perempuan hampir sama. Semua dapat jodoh masing-masing. Kecuali yang apes.

Idealnya juga, orang yang berangkat belajar ke sekolah adalah anak-anak yang ‘tuntas’ dididik dengan baik oleh keluarganya dalam hal adab. Bukan anak-anak yang kecewa dan marah kepada orang tua mereka. Bukan anak-anak yang menyimpan dendam kepada anggota keluarga mereka. Bukan anak-anak yang kecewa sehingga sekolah jadi wahana ekspresi melampiaskan emosi karena di sana bisa berkumpul dengan anak-anak sebaya mereka.

Idealnya, guru berangkat dengan wajah segar. Kesejahteraan yang baik. Tidak ada ancaman dipindah gara-gara Pilkada. Apresiasi kepada pendidik dari warga harusnya juga tinggi. Karena mereka, para guru, ikut membentuk karakter anak-anak mereka. Idealnya kan begitu.

Tapi hidup ini nggak ideal, apalagi negara ini.

Jadi, jika dalam kondisi seperti itu, ada guru yang ‘sesekali’ menjewer atau mencubit anak satu semester sekali, ya nggak usah berlebihan dalam bersikap. Karena tidak ada yang menjamin anak-anak kita berangkat ke sekolah dengan jiwa yang sehat dari sebuah keluarga yang juga sehat.

Makin ke sini, makin ada kecenderungan orang tua yang aneh. Takut anaknya kena narkoba, dimasukkan ke pondok pesantren. Dari niatnya saja sudah

keliru. Kalau anaknya bandel, sekolah diminta bisa ‘memperbaiki’. Lha itu sekolah atau bengkel mental...

Ya memang, sekolah termasuk pesantren, bisa punya kontribusi membangun mental anak didik. Tapi orang tua tidak bisa pasrah bongkolan begitu saja. Terima beres.

Lha ndasmu. Situ yang kenthu, sini yang ngelu...

Lagi pula, jumlah guru itu lebih dari 1,7 juta orang. Pasti tidak ada yang sempurna sebagai pendidik. Kalau ada guru yang tiap hari hobinya mukulin muridnya, itu sih wajib menggelandang oknum itu ke meja hijau. Namun, rasanya juga tak perlu berlebihan bilang, “Gurunya aja gemar nyubitin anak, sistem pendidikan bobrok, hasilnya banyak koruptor.”

Perkataan itu melanggar akal sehat.

Pertama, oke sistem pendidikan kita belum bagus, tapi apa ya benar sebegitu bobroknya? Kedua, apa korelasi langsung antara sistem pendidikan dengan jumlah koruptor? Seakan sistem pendidikan adalah variabel tunggal penyuplai koruptor di negeri ini. Ketiga, balik lagi, kok para orang tua cuci tangan dari pendidikan anak-anak mereka? Para orang tualah sejatinya pendidik utama para anak.

Logika sengkarut dan ruwet macam itulah yang kini berkembang. Lama-lama, makin banyak saja orang yang mudah menyalahkan sesuatu, tanpa diendapkan dulu. Laku mental yang sangat penting bernama ‘refleksi’ sepertinya sudah lama makin dijauhi. Mungkin karena diambil alih oleh bisnis pijat telapak kaki.

Tapi juga tidak bijak membuli para anak yang membuat beberapa guru dilaporkan ke polisi. Anak-anak itu juga korban. Mungkin korban ganda. Korban dari orang tua dan keluarga yang tidak mengerti bagaimana mengurus dan mendidik anak, korban dari lingkungan komunitas kota/desa/kampung yang tidak ramah terhadap mereka, juga korban dari sistem pendidikan yang belum baik. Jadi ya keliru besar kalau menyalahkan para anak tersebut.

Era ini memang serbacepat. Media sosial dan teknologi memfasilitasi itu semua. Tapi bukan berarti membuat kita juga cepat berkomentar, cepat menghakimi, dan cepat melaporkan seorang guru ke pihak polisi.

Diam dulu. Melakukan pijat telapak kaki. Eh, melakukan pengendapan pikiran. Melakukan refleksi.

Ngomong-ngomong, saya pernah juga sekolah SD, SMP, SMA, dan kuliah. Saya cukup sering ikut reunian. Di saat reuni itu, saya baru menyadari, guru-guru yang dulu galak itu, malah sering diundang, dipeluk dan dicium tangan penuh rasa terima kasih.

Kalau paragraf di atas kamu baca dan tafsirkan bahwa saya mendukung kekerasan di sekolah, ya nggak apa-apa. Namanya juga tafsir. Saya pun berhak menjawab: ah, teleklah kamu...

Lampiran 4. Misteri di Balik Gerakan Cinta Rupiah

Misteri di Balik Gerakan Cinta Rupiah

Rupiah sedang melemah. Sebetulnya istilah melemah untuk rupiah tidak tepat, istilah yang paling pas itu melorot. Namun apa daya, harus ada sedikit penghalusan bahasa supaya saya agak terkesan cinta rupiah.

Nah, soal cinta rupiah. Sudah lama gerakan cinta rupiah ini muncul. Biasanya akan didengungkan kembali ketika rupiah mulai melotrok gak keruan seperti muka penjudi yang kalah dan sudah tiga hari gak tidur karena menyuntuki kartu remi.

Sebetulnya, seruan itu untuk mencintai duit atau mencintai rupiah sebagai mata uang sekaligus bagian dari mencintai Indonesia? Jika Anda tanyakan kepada orang yang menyerukan itu, biasanya para pejabat, maka jawabannya pasti yang kedua. Tapi apa benar? Sebab saya yakin yang menyerukan itu pasti punya banyak uang dolar, baik Amerika maupun dolar yang lain. Percaya para pejabat tidak punya dolar sama saja percaya bahwa Agus Mulyadi tidak punya gigi.

Bagi awam, tidak ada salahnya jika memahami bahwa seruan tersebut sebagai seruan untuk mencintai duit. Kalau mencintai duit ya tidak ada salahnya ikut ambil bagian segera menukar rupiah ke dolar. Setidaknya untuk berjaga-jaga supaya nilainya tidak terus tergerus. Sukur kalau dapat untung.

Lha kalau dituduh tidak cinta Indonesia bagaimana? Halah, itu kan cuma tuduhan. Belum tentu terbukti. Kalau cuma dibuktikan hanya dengan seseorang menukar rupiahnya dengan dolar, itu tuduhan yang dangkal. Kok bisa? Terlalu

banyak orang yang sudah membuktikan siap sakit tanpa jaminan, siap kere tanpa masa depan, siap berkorban karena pajak rakyat dikorupsi besar-besaran. Kita tetap berdiri di sini dengan gagah berani. Apalagi yang perlu dibuktikan sebagai wujud cinta kita kepada Indonesia?

Cuma nukar rupiah kita yang sedikit supaya gak tergerus saja kok dibilang tidak cinta Indonesia. Itu kan sama saja dengan Anda banting tulang tiap hari untuk anak dan istri, tiba-tiba ada perempuan cantik nongol di teve, lalu Anda pandangi. Terus tiba-tiba dituduh gak cinta istri. Kan taek ah, dong...

Bagaimana kalau dituduh terlalu mencintai hal duniawi, karena mencintai duit? Ya sebelum ditukar ke dolar, masukkan dulu beberapa puluh ribu ke kotak amal. Nanti yang bilang begitu akan tersenyum dan bilang Anda orang yang mencintai akhirat. Ukuran mencintai dunia dan akhirat hanya setipis rambut.

Katanya, kemiskinan punya kecenderungan pada kekufuran. Katanya kalau kerja disuruh punya paradigma akan hidup selamanya. Tapi kan itu katanya, lha kalau gak katanya terus gimana... Repot amat sih mikir kita. Ada banyak ustadz yang gak mau kita undang jadi pembicara atau memberikan tausiah kalau tidak jelas berapa isi rupiah di dalam amplop kita. Kalau ustadz boleh begitu, terus kita tidak boleh begitu? Walaupun gak gitu-gitu amat. Begitukah? Raimu koyok terasi...

Nanti kalau tuduhan makin keras, Anda dituduh tidak nasionalis dan antek asing, saatnya Anda bertamu ke Si Penuduh sambil bilang begini:

“Cak, aku ini beli pecel lele, beli rokok, bayar pajak, dan sekian puluh aktivitas lain dengan masih memakai rupiah. Kamu tuduh aku cuma punya beberapa lembar dolar saja sebagai antek asing? Pantesan rupamu kalah ganteng dibanding rambut Arman Dhani!”

Kalau orangnya omak-umik mau balas lagi, masukkan koin 500an rupiah sejumlah 10 buah ke mulutnya. “Ini untalen cinta rupiah!”

Lampiran 5. Benarkah Berhenti Merokok Bisa Membuat Kita Kaya?

Benarkah Berhenti Merokok Bisa Membuat Kita Kaya?

“Mari cek apakah hitung-hitungan menabung lewat berhenti merokok itu masuk akal.”

Setiap awal tahun, pasti ada saja resolusi tahun baru. Selain tentu saja ramalan bintang dan shio, tidak lupa aneka kiat dan siasat, mulai dari hidup sehat sampai hidup hemat.

Salah satu yang kerap terjadi adalah kiat hidup hemat pangkal kaya dengan cara berhenti merokok. Kalau untuk tema kesehatan, okelah masih bisa diperdebatkan. Tapi, kalau soal bisa kaya karena berhenti merokok, mari kita uji secara rasional dan kritis.

Berhenti merokok bisa kaya karena misalnya sehari pengeluaran seseorang untuk merokok seharga 20.000 rupiah, kali sebulan: 600.000 rupiah. Kalikan setahun? Sebesar 7.200.000. Kalikan 10 tahun? Jadilah angka 72.000.000 rupiah. Besar sekali ya? Oya? Benarkah?

Mari kita ambil contoh seorang penulis seperti Iqbal Aji Daryono. Satu esainya yang dimuat di sebuah media onlen nasional diberi honorarium minimal 1 juta rupiah. Untuk membuat esai itu, dia hanya butuh menghabiskan setengah bungkus rokok. Itu artinya, dengan asumsi sebungkus rokok seharga 20.000 rupiah, maka Iqbal hanya dengan modal 10.000 rupiah, dalam waktu kurang dari 2 jam, melipatgandakan modal tersebut menjadi 1 juta rupiah. Berapa kali lipat? Seratus kali lipat.

Itu baru Iqbal. Belum Agus Noor, dengan modal sekira 5 bungkus rokok, dia bisa menyelesaikan satu naskah drama yang konon harganya belasan juta bahkan lebih.

Itu dari sisi penulis. Saya ambil contoh yang lain. Desainer grafis seperti Ega Fansuri atau Azka Maula, misalnya. Harga desain sampul buku mereka berdua 750.000 rupiah. Sekali mendesain buku, paling tidak habis setengah bungkus rokok. Kalau sehari mereka menghabiskan sebungkus rokok untuk mendesain 2 sampul buku, maka hanya dengan modal 20.000 mereka meraup uang 1,5 juta.

Kalau saya paparkan lagi ke profesi lain, Anda bisa lebih menjerit lagi. Misalnya, perupa yang anggaplah menyelesaikan lukisannya dengan ukuran 2 x 3 meter. Anggaplah diselesaikan dalam waktu 10 hari. Sehari katakanlah habis 2 bungkus rokok. Berarti selama 10 hari habis 20 bungkus rokok. Artinya uang yang dikeluarkan untuk merokok sebesar 400.000 rupiah.

Kalau perupa itu masih tahap pemula, lukisan seukuran itu dihargai antara 30 s.d. 40 juta. Kalau lumayan terkenal, bisa sampai 100-an juta. Kalau terkenal, yah 200-an juta. Kalau terkenal banget, bisa di atas semiliar!

Kok hitung-hitungannya disimplifikasi hanya rokok saja? Kenapa kreativitasnya tidak diperhitungkan?

Lha kan yang memulai menghitung dengan cara simplifikasi itu yang duluan ngasih kiat kaya dengan cara berhenti merokok, bukan? Mereka melepaskan rokok dari sekian konteks lain. Seakan merokok merupakan perbuatan paling sia-sia dan tak berguna.

Itu pun belum jika saya hitung harga lain yang harus dibayar orang jika berhenti merokok. Ini berdasarkan riset kecil-kecilan saya.

Beberapa teman saya berhenti merokok, tapi ngemil sebagai gantinya: ngemil. Harga rokoknya 20.000 rupiah, ngemilnya habis 25.000 rupiah. Malah tekor, kan?

Tapi, yang sangat jarang dilihat oleh banyak orang adalah efek rekreatifnya. Bayangkan, Anda seorang pekerja kasar. Sehari membawa pulang uang 75.000 rupiah. Pulang. Capek. Penat. Lungkrah. Masak sih menghadahi diri dengan merokok setengah bungkus saja tidak boleh? Padahal besok harus bekerja keras lagi. Mereka juga perlu menghadahi diri sendiri. Terkadang, para aktivis antirokok yang kebanyakan kelas menengah ngehek itu, sering mengkritik: “Sudah miskin, merokok!”

Mereka belum pernah dibentak balik, “Ini duitku sendiri, hasil kerja kerasku sendiri, mau kupakai untuk ngerokok atau makan sate, ya suka-suka aku. Asal bukan untuk melakban mulutmu!”

Mereka sih enak, capek kerja pergi ke kafe, kalau nggak ya nonton film ke bioskop.

“Tapi kan lebih baik uang itu dipakai untuk membelikan lauk dan susu anak?” sergah kaum antirokok.

Jawabannya juga bisa tak kalah galak, “Kau pikir aku nggak ngasih anakku makan? Mana ada orangtua yang tega anaknya kelaparan sementara kami udad-udud? Memangnya kami sebejat itu?!”

“Tapi kan merokok mengganggu kesehatan?”

Nah kan, perdebatannya mulai dibelokkan. Kalah debat kok ngepot. Kalau debatnya soal itu, beda lagi kamar debatnya. Katanya kritis kok nggak tahu semesta perdebatan. Ini kamar debat untuk menguji benarkah berhenti merokok bisa membuat kita kaya? Paham, kan?

Kenapa hal ini layak dibantah? Karena penyakit simplifikasi itu tak baik buat otak kita.

Nggak suka merokok silakan. Nggak suka orang merokok juga silakan. Tapi, kalau mulai mengeluarkan argumen, ya mari kita beradu kekuatan pikiran.

Simplifikasi seperti itu mirip seorang ustad yang gemar sekali menyindir orang merokok. “Giliran nyumbang kotak mesjid, 2.000 rupiah. Tapi sekali merokok habis 20.000 rupiah.” Sungguh ini pernyataan yang aneh.

Si ustad kenapa nggak berpikir, orang yang membeli rokok sebungkus 20.000 rupiah, justru ketika menyumbang masjid ya makin banyak. Bisa 100.000, bisa 200.000, bisa sejuta. Dan kenapa dia bisa punya kesimpulan seperti itu? Seakan yang tidak merokok lalu menyumbang lebih banyak dari yang merokok. Padahal bisa jadi pas kotak sumbangan lewat di depannya, hanya digeser begitu saja.

Simplifikasi, hitam-putih dalam memandang hidup dan perilaku manusia, memang kerap mengganggu akal sehat kita.

Ngomong-ngomong, tulisan ini dibuat dengan hanya menghabiskan dua batang rokok saja.

Lampiran 6. Konspirasi Yahudi di Balik Harga di Balik Harga Rokok 50.000 Perbungkus

Konspirasi Yahudi di Balik Harga di Balik Harga Rokok 50.000 Perbungkus

Sebetulnya tidak ada yang aneh di balik isu harga rokok yang rerata 13.000 rupiah, lalu melejit menjadi 50.000 rupiah perbungkus. Ini taktik pertempuran yang biasa saja.

Alurnya begini. Kaum antirokok membuat studi, di harga berapakah para perokok akan berhenti merokok? Didapatlah harga 50.000 perbungkus. Kemudian

penelitian ini didesiminasikan ke beberapa situsweb abal-abal. Diperbesar dengan tim buzzer di dunia maya, plus segala gimmick nan kreatif.

Ketika mulai ramai, maka langkah selanjutnya, mereka melakukan placement di media-media besar yang seakan-akan berita. Taktik yang dipakai berupa tanggapan tokoh lewat teknik doorstep. Para tokoh diwawancara dengan pertanyaan: ‘Apa tanggapan Bapak/Ibu dengan usulan masyarakat bahwa harga rokok sebaiknya dinaikkan menjadi 50.000 perbungkus?’

Dasar elit politik di negeri pencitraan, bukannya bertanya balik untuk mengkritisi, kebanyakan dari mereka berkomentar mendukung naiknya harga rokok. Politikus-politikus macam begitulah yang banyak menjadi korban para pakar hoax dunia maya. Malu bertanya, ancur muka kemudian.

Lampiran 7. Rezim Anti-antian yang Mengganggu Kewarasan Nalar Kita

Rezim Anti-antian yang Mengganggu Kewarasan Nalar Kita

“Semua yang dilarang punya alasan. Entah karena kesehatan atau industri besar di belakangnya. Kamu anti apa?”

Saya termasuk orang yang tidak habis pikir, kenapa kelas menengah di Indonesia mudah sekali melempar kekeliruan pada satu orang. Sedikit-sedikit salah Jokowi. Sedikit-sedikit pasti ulah Prabowo. Bagi yang anti-Ahok, semua yang kesalahan yang terjadi akibat ulah Ahok. Sebaliknya, bagi yang anti-Anies Baswedan, ban motor bocor pun mungkin dianggap kesalahan Anies. Semuanya mau dibikin anti.

Tapi saya mulai sadar. Sebetulnya bibit fasisme semacam itu di kepala kebanyakan dari kita punya sejarah yang panjang. Sekali meyakini sesuatu, maka itulah kebenaran paripurna. Tidak mau menerima atau setidaknya menelaah perkembangan terbaru, mengkritik fenomena tertentu, atau bahkan menusuk sampai ke sikap kritis: jangan-jangan ada sesuatu di balik hal anti tertentu.

Segala hal yang sudah dianggap final adalah musuh utama pikiran waras. Tapi, kita memang suka yang final-final. Nggak pakai mikir lagi. Malas memikirkan sesuatu. Kemalasan seperti ini tentu bisa berakibat tidak baik. Apalagi jika menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Apalagi jika menyangkut hajat hidup orang banyak. Anti itu membunuh nalar.

Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Hal yang sudah kita ketahui dinamikanya dari dulu sampai sekarang sehingga mudah menarik poin-poin pelajarannya.

Bagi Anda yang berusia 35 sampai 45 tahun mungkin juga mengalami hal ini. Dulu waktu saya duduk di bangku SD, antara kelas 4 dan 5, ada petugas puskesmas datang secara reguler ke sekolah saya untuk bicara bahwa minyak kelapa itu tidak sehat. Saat itu di kampung saya, hampir 90 persen pengguna minyak goreng memakai minyak kelapa, yang 10 persen memakai pasir untuk menggoreng bahan makanan. Semoga Anda tahu kalau pasir bisa dipakai untuk menggoreng.

Di buku-buku pelajaran, isu dan tema itu juga ada. Bahkan di dalam soal THB (Tes Hasil Belajar). Sampai mungkin akhir SMP, berita soal tidak sehatnya minyak kelapa sering saya baca di koran dan saya dengarkan di radio.

Tentu saja saat itu saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya bisa mengingat dengan baik hal itu. Dua puluh tahun lebih kemudian, saya baru mengerti kalau ada komoditas penting kita yang hancur: kopra. Ternyata proses penghancurannya persis di era ketika saya kecil sampai remaja.

Tiba-tiba lima belas tahun yang lalu mulai ada berita-berita yang melansir penelitian bahwa minyak kelapa justru minyak yang paling sehat selain minyak zaitun. Pelan-pelan minyak kelapa dicari dan dikonsumsi lagi. Poin pentingnya adalah seandainya tidak ada isu minyak kelapa itu buruk bagi kesehatan, yang dilakukan secara masif, Indonesia sebagai negara tropis dan salah satu yang punya garis pantai terpanjang di dunia pastilah sudah punya Industri minyak kelapa yang berkembang pesat, yang seluruh rantai ekonominya nisbi sentosa.

Itu soal minyak kelapa. Pelan-pelan kita masuk ke isu yang lain. Isu kopi.

Apa yang terjadi pada minyak kelapa juga terjadi pada kopi. Sekira 25-an tahun lalu, kopi juga kena isu sebagai minuman tak sehat. Bahkan perdebatannya sampai pada halal atau haram. Kalau dulu ada orang sakit, standar nasihat yang diberikan adalah jangan minum kopi. Jauhi kopi. Kalau perlu anti terhadap minuman itu.

Namun, beberapa tahun terakhir, kopi berubah menjadi minuman sehat. Kalau Anda mau berolahraga, malah disarankan minum kopi terlebih dahulu. Bahkan sekarang, di beberapa rumah sakit sudah ada kedai kopinya. Rasanya rumah sakit itu kurang keren kalau tidak ada kedai kopinya.

Mari kita lanjutkan lagi. Ya, persis. Dugaan Anda benar. Kita masuk ke isu rokok.

Kita mulai dari yang ringan dulu. Tujuh atau delapan tahun lalu saya termasuk ikut mengingatkan bahwa agenda di balik perang melawan rokok sebetulnya soal perang dagang. Perang dagang antara industri farmasi versus industri rokok. Keduanya sama-sama menggunakan nikotin.

Mudahnya kira-kira begini: rokok harus dianggap jahat. Agar bisa sembuh dari merokok, konsumsilah nicotine replacement therapy (NRT).

Dulu banyak orang nggak percaya. Lalu apa yang kita saksikan hari ini? Di sebuah konferensi penting yang digelar lembaga antirokok, jelas tertera di situ: mendorong NRT agar didukung oleh pemerintah. Supaya harganya kompetitif, rokok harus dimahalkan atau harga NRT diturunkan. Ujungnya: dulu ramai-ramai dibilang tidak mungkin jualan NRT, ternyata sekarang mulai jujur dan terbuka. Nggak percaya? Buka saja tautan situs webnya.

Berhenti dulu di sini. Pelan-pelan.

Dulu, pertarungan keduanya itu sempat mentok. Kenapa? Karena di Amerika dan Eropa sana, awal mula perang nikotin ini, merokok dianggap sebagai kebebasan individu. Toh kalau anggaplah tidak sehat, maka itu pilihan bebas individu. Hampir sama logikanya dengan miras.

Antirokok pusing. Berpuluh tahun isu itu tidak bisa ditembusnya. Bisnis terancam gagal. Tapi, ndilalah, otak mereka meletik; mereka menemukan sesuatu yang sangat penting, yang mengubah dinamika perang nikotin ini. Apa itu: perokok pasif atau second hand smokers.

Kira-kira begini: merokok itu bukan pilihan bebas karena ada asap yang terhirup oleh orang lain. Ada orang yang terpapar asap rokok.

Isu itu mengubah dengan cepat konstelasi pertarungan. Pabrik rokok dianggap sebagai setan (termasuk petani tembakau). Dan tentu saja industri

farmasi dianggap sebagai malaikat. Hukum ekonominya jelas: kalau malaikat mau eksis dan dibutuhkan, dia butuh setan.

Singkirkan dulu pertanyaan nakal Anda: kenapa kok asap rokok saja, kenapa tidak asap pabrik dan asap knalpot?

Saking ampuhnya isu ini, hampir setengah abad mewarnai perang nikotin ini. Bahkan saking berhasilnya, evolusi isunya pun menanjak: perokok pasif lebih berbahaya dibanding perokok betulan. Bahkan sampai kepada third smoker alias perokok terpapar ketiga. Apa maksudnya? Silakan berselancar di dunia maya. Istilah itu pengandaiannya begini: kalau ada perokok merokok di luar rumah, lalu dia masuk ke dalam rumah, maka baju, mobil, jaket, atau apa pun yang terkena paparan asap rokok akan meracuni. Jaket perokok, baju perokok, kopiah perokok, sarung perokok, mobil perokok, semua berbahaya. Harus dijauihi.

Masalahnya adalah penelitian tentang perokok pasif ini ternyata masuk dalam kategori junk science. Bahkan beberapa tahun terakhir berbagai jurnal ilmiah sudah membatalkan dan merevisi soal perokok pasif ini. Apalagi perokok ketiga.

Namun lagi-lagi, banyak orang tidak mau terbuka wawasannya. Isu perokok pasif dianggap final. Kalau datanya sudah disodorkan, baru kemudian mereka bilang: ya, tapi saya terganggu dengan asap rokok. Oke. Stop sampai di sini dulu.

Hal seperti ini pula yang sering mengganggu kewarasan nalar kita. Kalau Anda terganggu dengan asap rokok, sudah ada aturannya: Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sekaligus mengatur ada ruang untuk merokok. Kalau ada perokok yang bandel, melanggar aturan, orang itu yang salah. Sama kayak ada orang kebut-kebutan naik mobil atau sepeda motor. Maka, yang disalahkan pelakunya, bukan kendaraannya.

Perokok bisa salah sebagaimana pengemudi kendaraan bisa salah. Tentu saja yang salah harus diingatkan. Hukum harus ditegakkan! Tro tok tok tok tok!

Sudah mulai jernih ya. Lalu ada yang bertanya, lho kok saya tahu informasi itu? Ya membaca buku. Membaca artikel. Mengikuti isu ini. Sebagai pengantar, Anda bisa membaca buku *Nicotine War*. Sudah diterjemahkan. Di situ dibabot sejarah perang nikotin ini, termasuk beberapa penelitian yang disebut junk

science itu. Masalahnya, mau tidak Anda membaca, dan membaca dengan rasa adil sejak dalam pikiran. Malu kan sama Pramoedya Ananta Toer yang ucapannya itu sering dikutip tapi ternyata kita tidak bisa melakukannya?

Soal rokok ini, bisa saya perpanjang. Tapi, saya tidak mau berlebihan. Cukup segini saja dulu. Kita geser sedikit ke kisah lain.

Dua tahun yang lalu saya memeriksakan anak saya yang saat itu berumur 3 tahun ke dokter keluarga kami. Dokter yang sekaligus dosen itu kira-kira bilang begini kepada saya, “Pak Puthut, Anda kan penulis, tolong bantu saya dan teman-teman. Sekarang ini banyak sekali orang latah antigula dan antigaram. Sedikit-sedikit selalu kami dengar: gula berbahaya, garam berbahaya. Itu dikatakan kepada sembarang orang, lalu dipraktikkan dengan cara sembarangan.

“Gula dan garam itu penting bagi tubuh kita. Kalau berlebihan memang jadi bahaya. Tapi, tidak boleh kita katakan sembarangan kalau gula dan garam itu berbahaya. Lalu orang-orang diet gula dan garam tanpa tahu kondisi tubuh mereka sendiri apakah memang sudah berlebihan gula dan garam. Ini kenapa orang-orang merasa sok pintar sekali. Sialnya, kebanyakan orang kemudian menganggap hal itu sebagai kebenaran.”

Apa yang dikatakan dokter tersebut sepertinya sederhana, tapi bagi saya tidak. Keawaman kelas menengah kita atas satu isu dengan mudah disebarkan tanpa melihat situasi dan konteks. Sekarang ini semua penyakit, selain tertuduhnya karena rokok, mulai ada tuduhan lain: gula dan garam.

Pertanyaan lebih lanjut, memang pada setiap isu seperti itu apa ada keuntungannya? Silakan kita cek. Kalau perang nikotin sudah saya jelaskan siapa yang berantem dan siapa yang beruntung. Kalau soal minyak kelapa, kopi, gula, dan garam, siapa yang beruntung?

Masak sih Anda nggak tahu. Nggak tahu atau malas mencari tahu?

Eh, ngomong-ngomong beberapa tahun terakhir ini, beras juga dianggap jahat lho. Sumber penyakit. Harus dijauhi. Padahal nenek moyang kita mengonsumsi beras sudah lebih dari seribu tahun lalu. Mestinya kalau beras itu jahat, nenek-moyang kita sudah punah ya

Mestinya lho ya Lagian, kok senang sekali sih kita menimpakan kesalahan atas perilaku dan gaya hidup kita kepada benda-benda, tumbuhan, binatang, termasuk kepada satu orang?

Dengan poin-poin seperti itu, wajar saja jika ada hal yang salah, semua salah Jokowi, salah Prabowo, salah Ahok, salah Anies.

Pokoknya sampean ngeten ??!

Lampiran 8. Film Sunyi Sepenggal Kisah Wiji Thukul

Film Sunyi Sepenggal Kisah Wiji Thukul

Saya tidak kenal Wiji Thukul. Saya juga bukan penulis review film. Pangkat saya tertinggi dalam hal film adalah saya menonton film di bioskop bisa 3 kali dalam sehari. Itu saja. Atau paling-paling waktu masih muda dulu, ketika masih singset dan langsing, saya punya potensi menjadi bintang film penerus Onky Alexander yang katanya habis bercerai itu.

Saya hanya pernah sekali melihat Wiji Thukul secara langsung. Waktu itu saya masih mahasiswa baru di Fakultas Filsafat UGM. Ketika suatu hari tiba di kampus dengan mata masih mengantuk karena semalaman begadang, ternyata situasi kampus agak ramai. Dan ternyata sedang ada penyelenggaraan seminar yang salah satu pembicaranya saat itu adalah Wiji Thukul. Pembicara lainnya, yang sepanjang jalannya seminar merokok terus-menerus, kelak saya kenal bernama Faruk HT. Salah satu profesor sastra yang mintilahir itu, dan sampai sekarang masih merokok dengan kuat.

Isi seminar itu tidak ada yang nyantol di kepala saya. Sastra saat itu, bukanlah hal yang terlalu menarik perhatian saya. Tapi sajak-sajak Wiji Thukul sangat akrab dengan saya. Karena semenjak perploncoan masuk kuliah, hingga kelak ikut demonstrasi dari sejak awal kuliah sampai tahun 1998, saya termasuk sering kebagian membaca sajak-sajak Wiji Thukul. Jangan salah, kalau saya teruskan keahlian baca puisi itu, mungkin WS Rendra, Landung Simatupang, Emha Ainun Nadjib, atau Sosiawan Leak, punya saingan yang serius. Tapi saya memutuskan tidak menulis puisi dan membacakan puisi.

Sampai sekarang, saya termasuk masih sering berusaha memutakhirkan kabar soal Wiji Thukul, salah satunya ketika saya mendengar tengah ada

sekelompok anak muda yang menggarap film tentang penyair besar itu. Dan saya termasuk yang paling suka membagikan berita ketika film besutan sutradara Yosep Anggi Noen itu sering diputar di berbagai festival film internasional. Sudah barang tentu bukan karena festival internasionalnya, tapi karena saya ikut bangga.

Bagaimanapun, Wiji Thukul bagi saya adalah salah seorang penyair besar di Indonesia. Sajak-sajaknya nyaris wajib dibacakan di aksi-aksi massa menentang rezim Suharto hingga Presiden kedua RI tersebut tumbang. Sajak-sajak seperti 'Bunga dan Tembok' atau 'Peringatan', dihapal luar kepala oleh para demonstran. Salah satu penggalan kalimat di puisinya, "Hanya ada satu kata: lawan!", juga seolah wajib dipekirakan di setiap orasi, dan dipakai untuk mengakhiri tulisan selebaran.

Kebesaran nama penyair yang sampai sekarang masih hilang itulah, yang juga membuat saya semangat ketika kru film 'Istirahatlah Kata-kata' menawarkan kru Mojok untuk menonton. Di kalangan lembaga, kami adalah lembaga kedua yang dipercaya untuk menonton duluan film tersebut.

Saya menonton bersama dua redaktur Mojok: Agus Mulyadi dan Prima Sulistya, yang keduanya berusia 25 tahun. Lalu Aditya Rizki, web developer Mojok. Usianya: 27 tahun. Kemudian ada juga Eka Pocer, pemilik penerbitan indie Penerbit Oak. Usianya juga 25 tahun. Terakhir, anak muda yang paling ngotot untuk bisa ikut menonton. Namanya Aditia Purnomo. Usianya masih 23 tahun. Artinya, saya sedang menonton sebuah film tentang sosok yang kuat di kepala saya karena momentum 98, bersama dengan anak-anak muda yang ketika Suharto turun, mungkin masih kelas 2 atau kelas 3 SD. Agus di usia seperti itu, pastilah sosok anak yang tititnya sering kejepit resleting celana jika sedang pipis.

Film itu mengambil sepenggal kisah Wiji Thukul saat dia dalam pelarian, ketika dia dan teman-temannya menjadi tersangka atas kasus 27 Juli 1996. Kenapa penggalan ini yang justru diambil oleh sutradara, tentu sutradara dan kru filmnya yang paham. Sebab di kurun ini, adalah kurun Thukul dikejar-kejar aparat. Kurun dia tinggal di Pontianak, kota persembunyiannya. Kurun yang sunyi dan penuh ketakutan.

Karena itu, jangan berharap di sana ada pekik perjuangan. Rapat-rapat. Pengorganisasian demonstrasi. Aparat yang keji. Bentrokan yang keras antara

demonstran dengan aparat. Tidak penggalan para demonstran terpompa semangat mereka karena sejak Wiji Thukul dibacakan. Juga tidak ada potongan suara dan gambar Suharto turun sebagai simbol kemenangan perjuangan mahasiswa dan rakyat di salah satu babak yang menegangkan di republik ini.

Di film ini ada rentetan panjang seorang Thukul yang dimainkan dengan keren oleh Gunawan Mohamad eh Gunawan Maryanto, dalam keadaan yang tertekan dan penuh ketakutan. Tentu bagi saya, itu terasa kuat. Karena jangankan Wiji Thukul, saya yang saat tragedi itu meletus, hanyalah anak bawang, juga ikut lari. Di kampung saya, orangtua saya ikut dikumpulkan di kantor kecamatan bersama puluhan orangtua lain yang anak mereka kuliah. Saya kemudian dipanggil pulang sejenak ke kampung untuk membuktikan bahwa saya tidak terlibat apapun dengan peristiwa politik itu.

Wiji Thukul jelas berbeda. Saat itu jelas dia buron politik. Wajahnya selalu tenggelam dalam topinya. Gestur tubuhnya adalah gestur orang yang waspada sekaligus paranoid. Kalimat-kalimat yang muncul dari mulutnya terlihat hati-hati.

Sehingga sepanjang jalan film itu cukup miskin musik dan dialog. Film yang menyerupai kita menyusuri jalan kecil di pinggir hutan yang lengang dan mencekam. Jalan kecil yang membuat kita bisa tiba-tiba dipatuk ular berbisa dan ditubruk seekor macan.

Adegan-adegan Thukul di pelarian sering berganti dengan adegan-adegan Sipon, istrinya, yang memancarkan kekhawatiran sekaligus penantian. Sipon yang berusaha tetap terlihat tenang dalam berbagai intimidasi pihak aparat. Sipon yang tetap kuat dengan terus mengurus kedua anaknya: Fitri Nganti Wani dengan Fajar Merah, yang saat kejadian itu masih sangat kecil. Fitri mungkin masih balita. Fajar bahkan masih bayi. Dan di penggal Solo itu, muncul tokoh tetangga Sipon yang diperankan Joned Suryatmoko. Akting Joned juga mengagumkan. Dalam dialog-dialog yang minim, dia bisa terlihat sangat ngacengan. Gunawan Maryanto dan Joned Suryatmoko memang juara. Keduanya selain sutradara teater yang hebat, juga aktor pilih tanding.

Dipilihnya Gunawan Maryanto menjadi aktor yang memerankan Wiji Thukul, saya kira pilihan yang tepat. Keduanya penyair. Konon, hanya penyair

yang lebih mudah memahami penyair lain. Walaupun jenis syair Gunawan berbeda dengan Thukul. Syair-syair Gunawan terasa liris, pilu, dan sepi. Sementara syair-syair Thukul membakar dan bertenaga.

Ketika film itu usai, lampu dinyalakan, saya berusaha melihat roman muka anak-anak muda yang menonton film itu bersama saya. Wajah Agus, Prima, Eka, Aditya, dan Adit. Saya penasaran apa kira-kira tanggapan mereka. Sebab bagi saya, apa yang saya tangkap dengan mereka pasti berbeda. Karena bagi saya, siulan lagu Darah Juang yang ada di film tersebut saja sudah cukup membawa saya ke masa lalu. Tapi kawan-kawan saya itu mungkin tidak merasakan apa-apa dengan lagu tersebut. Sebab di saat lagu itu dinyanyikan di jalan-jalan, mereka mungkin sedang sibuk main kelereng. Tapi ketika saya tanya berulang soal tanggapan mereka atas film itu, mereka lebih banyak diam sambil tersenyum. Mungkin sungkan berpendapat. Mereka lebih mudah tidak sungkan menembak gebetan dibanding berpendapat soal film yang ditonton.

Sebab bagi saya, film semacam ini penting bagi anak-anak muda seusia mereka. Bukan hanya soal supaya mereka kenal siapa itu Wiji Thukul. Tapi soal ada satu masa yang belum terlalu lama, kita kalau membaca buku harus sembunyi-sembunyi, melakukan berbagai kegiatan dikuntit intel. Tentara dan polisi di mana-mana. Kebebasan berbicara terasa mahal harganya.

Fase seperti itu yang, pelan-pelan juga mulai muncul lagi. Represi yang tumbuh lagi. Diskusi-diskusi buku didatangi dan dibubarkan para preman. Pemutaran film juga dilarang. Berbeda pendapat sedikit sudah main mengancam. Ketakutan kembali disebarkan.

Saya tak pernah membayangkan Agus Mulyadi dkk harus kembali membaca buku dengan sembunyi-sembunyi. Apalagi ketika berpendapat, harus ditangkap aparat.

Setidaknya itulah guna film ini. Sebab keberanian, sebagaimana ketakutan, juga menular. Film ini mampu menunjukkan bagaimana Thukul mencoba mengatasi ketakutan, dan berhasil. Hingga kemudian dia berani balik ke Solo menemui istri dan anak-anaknya. Lalu pergi lagi ke Jakarta untuk terus berjuang melawan rezim Suharto.

Hingga kemudian dia hilang. Sampai sekarang.

Lampiran 9. Batu Sungai Darah dan Kabut Asap Sumatera

Batu Sungai Darah dan Kabut Asap Sumatera

Smoking area Bandara Soekarno-Hatta. 18 September, pukul 10.00. Laki-laki di samping saya memakai batu yang sedang saya buru: Lumuik Sungai Dareh. Ia sontak panik ketika diumumkan bahwa penerbangan ke Pekanbaru ditunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan karena kabut asap. Televisi di ruang merokok ini kebetulan sedang mewartakan kabut asap di Sumatera Utara.

“Kuala Namo masih bisa terbang,” ungkap seseorang di seberang tempat duduk saya. Laki-laki bercincin di samping saya tampak lega. Dilihat dari raut wajahnya, usianya mungkin sekitar 50-an tahun. Ia meminjam korek api, kemudian terlibat obrolan, dengan orang di samping kanannya. Lalu menoleh ke kiri, ke arah saya.

“Adik ke mana?”

“Ke Jambi, Pak.”

“O, Jambi masih aman,” katanya sambil tetap menunjukkan rasa kesal.

Tapi saya tetap tidak tenang. Tahun 2003, selama setahun lebih saya trauma naik pesawat terbang gara-gara pesawat ke Jambi yang saya tumpangi hampir tidak bisa mendarat karena kabut asap.

Saya ceritakan kejadian tersebut.

“Di Pekanbaru parah, Dik. Hampir tiap tahun terjadi. Pengusaha-pengusaha sawit itu memang kurang ajar.”

Ia lalu berkisah. Untuk membuka lahan sawit, jika dilakukan secara benar maka membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bisa lebih dari setahun. Pengusaha-pengusaha itu lalu melakukan tindakan tolol dengan membakar hutan supaya proses pembersihan lahan mudah, cepat dan murah.

“Terus nanti yang disalahkan masyarakat. Yang buang puntung rokok-lah, yang ceroboh-lah. Padahal kan gampang diketahui, di satelit bisa langsung kita tahu lahan-lahan perkebunan mana dari perusahaan apa yang sedang terbakar.”

Ia tampak sedikit emosi. Lalu pinjam korek saya, dan menyulut rokoknya.

“Saya gak pernah ngerti ini maksud pemerintah apa. Begini terus! Mestinya tangkap satu, hukum dia, cabut izinnya, maka semua akan kapok. Kalau sudah begini, semua dirugikan.”

Saya melihat jam di tangan. Sebentar lagi boarding. Saya pamitan sembari meninggalkan korek. “Ini untuk Bapak,” ucap saya.

“O gak usah, Dik. Saya ada kok tapi di tas,” katanya sambil menunjuk tas di dekat pintu.

Segera saya meninggalkan smoking area, menuju ke tempat boarding dan bertanya ke petugas; Jambi masih on schedule? Dijawab masih.

Saya tetap tidak enak. Dan benar, tiba-tiba ada pengumuman, penerbangan ke Jambi ditunda untuk waktu yang belum diketahui karena alasan cuaca. Maksudnya pasti karena asap.

Lampiran 10. Tujuh Pertanyaan Remeh untuk Pembaca Bumi Manusia

Tujuh Pertanyaan Remeh untuk Pembaca Bumi Manusia

Sampai detik ini, pembuatan film adaptasi dari novel Bumi Manusia tetap ramai diperbincangkan. Mulai dari mendukung, hingga mencerca. Film adaptasi ini dianggap akan mengecewakan. Begitukah nalar yang benar?

Setidaknya ketika Orba hadir lewat instrumen politik dengan lahirnya partai baru trah Cendana, para pembaca Pramoedya Ananta Toer, juga terus lahir dan berlipatganda.

Kita tahu, Pram memosisikan diri berhadapan dengan Soeharto. Dia salah satu simbol perlawanan melawan penguasa Orba itu.

Orang seperti saya setidaknya nyicil ayam sebab masih ada tempat yang murwat di Republik ini untuk pribadi yang kokoh, perjuangan kemanusiaan, dan penghormatan atas karya sastra. Alhamdulillah...

Saya tidak akan menggunakan hal yang berat dan rumit, apalagi lewat kutipan-kutipan novel itu, untuk membantu memeriksa argumen para pihak yang keberatan. Tidak perlu seberat itu. Karena toh keberatan mereka merupakan ekspresi cinta dan hasrat yang baik atas karya sastrawan besar Indonesia.

Saya hanya akan memakai pertanyaan remeh dan receh saja. Hal yang mudah saja. Dan ini bukan untuk membantah bahwa keberatan itu tak masuk akal. Bukan. Pram tak perlu dibela. Dia telah membuktikan sebagai pemenang zaman. Film adaptasi ini juga tak perlu dibela. Lha wong geheran ini juga akan

menguntungkan mereka kok. Tapi bakulurus nalar adalah tugas kita bersama. Tanpa harus bersitegang.

1. Ini sungguh pertanyaan remeh sekali: Kalau filmnya jelek, terus apa novel ini jadi ikut-ikutan jelek gitu? Misalkan, film bikinan Hanung ini jelek banget, apakah kemudian memberi pengaruh sehingga novel itu jadi jelek?

2. Setahu saya, film ini baru akan diproduksi. Terus kenapa bisa dibilang filmnya jelek? Bukankah filmnya belum jadi? Memang film bagus atau tidak bisa ketahuan sebelum jadi ya? O, bisa? Oke. Sip.

3. Banyak yang bilang, Hanung Bramantyo menyepelekan Bumi Manusia karena Iqbal Ramadhan si pemeran Minke, tidak perlu diberi buku tebal-tebal. Ya Iqbal memang mau memerankan tokoh Minke. Dia bukan Minke. Dia pemeran Minke.

Iqbal kan mau main film. Mungkin maksudnya itu...

Kamu juga bilang kalau Hanung gak paham Bumi Manusia karena menurutnya, buku ini berisi soal pemberontakan Minke atas dunia Barat. Itu pandangan yang keliru karena justru Minke terpesona pada modernitas Barat. Kalau begitu, kan, yang gak paham Hanung, kenapa yang dipersoalkan adalah Iqbal? Jadi Hanung atau Iqbal? Atau keduanya? Atau semua alasan atas pembuatan film itu?

4. Film atau produk budaya lain, dia tidak lepas dari sekian variabel yang mengelilinginya. Dia punya tanah sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, tiba-tiba banyak orang ingin film Indonesia mendadak harus bermutu luar biasa bagus hanya karena sedang akan memproduksi film ini? Ibarat sebuah lahan yang selama ini menghasilkan kualitas tanaman semenjane tiba-tiba diminta menghasilkan mutu panen yang bagus hanya semata karena bibitnya bagus. Apakah ini masuk akal?

5. Terus banyak yang bilang kalau pemeran Minke harus ini dan harus itu. Iqbal tidak cocok memerankan Minke. Terus yang cocok siapa? Reza Rahadian? Atau Nicholas Saputra? Kamu mau Dian Sastro jadi Annelies-nya? Jadi siapa yang cocok? Pasti ada polemik. Tapi ngomong-ngomong, asal ada Dian Sastro, saya setuju sih...

6. Ada banyak hal yang dibahas Bumi Manusia. Novel itu berisi sekian lapis konten yang terpaut satu sama lain. Novel memang medium yang paling pas

untuk mengekspresikan hal seperti ini. Kalau diadaptasi di dalam film, tentu saja tidak mungkin semua hal terakomodasi. Fokus tema mana yang cocok untuk menjadi film adaptasi ini? Tuh kan malah berdebat sendiri. Ya memang begitu, pasti ada perdebatan dan ketidaksetujuan. Jadi rileks saja...

7. Kalau Pram mau, Bumi Manusia pernah mau dibeli haknya dan dibikin oleh Oliver Stone. Tapi saat itu Pram gamang. Dia berpikir: Masak gak ada sih, orang Indonesia yang bisa bikin film ini? Oke. Sekarang Hanung yang terpilih untuk bikin. Kalau dia dirasa tidak tepat, terus menurutmu yang tepat siapa? Riri Riza? Garin Nugroho? Ifa Isfansyah? Yosep Anggi Noen? Atau Ali Mojok?

Lampiran 11. Tribun vs Remotivi: Kita Berdiri di Mana?

Tribun vs Remotivi: Kita Berdiri di Mana?

Tidak ada yang salah atas kritik Remotivi kepada Tribunnews (selanjutnya cukup ditulis: Tribun). Jelas dan jernih. Tapi, rasanya, ada yang kurang dalam perbincangan ini.

Analisis yang dipaparkan oleh peneliti Remotivi kepada Tribun seakan bisa menunjukkan ada jamur di kulit kita. Tapi tidak sampai memaparkan kenapa kulit kita jamuran?

Media massa, termasuk media digital, tumbuh dalam banyak tegangan. Mereka hidup dalam sebuah ekosistem digital yang serbacepat, kompetisi yang keras, usaha memindai hasrat terpendam netizen, dll., dll.

Itu semua sebetulnya bukan barang baru dalam wacana media online. Sudah terlalu sering dibicarakan dan didiskusikan. Tapi jamaknya persoalan pelik, makin sering dibicarakan bukan berarti makin tuntas.

Semua pemain media online tahu dan sangat sadar bahwa mereka berdiri di atas dua kaki: kaki “moral” jurnalistik dan kaki bisnis. Dua itu hal lama, bukan? Sejak sebelum media online tumbuh, media massa juga hidup dalam tegangan seperti itu. Bedanya, kalau dulu, nilai ekonomi sebuah media diukur dengan oplah, kini diukur dengan sekian alat ukur: pageviews, users, ranking Alexa, dll.

Saya kira, kita tak perlu membohongi diri sendiri, kalau semua media online membutuhkan hal di atas. Tanpa itu, iklan tak masuk. Tanpa itu, pengiklan tak tertarik. Tanpa itu, investor bermuka masam.

Tuduhan “tuyul” bagi Tribun memang tidak enak dirasakan. Tapi, siapa sebetulnya media online yang tidak mirip tuyul? Bukankah kata kunci, SEO, dan Google trend, itu semacam kembang setaman, kemenyan, dan lilin untuk menghidupi tuyul yang bernama “pengunjung”? Apakah jika Tribun dianggap tuyulnya Kompas, kita juga bisa menyebut Tempo.co sebagai tuyulnya Tempo, Radar sebagai tuyulnya Jawapos, dan lain sebagainya?

Seakan ada dualisme moralitas jurnalistik: ada bagian yang dianggap dan diperkenankan menimba uang haram dan ada yang bagian halal serta suci. Halal dan haram hanya soal bagi-bagi tugas semata.

Setiap media online membutuhkan uang. Mereka butuh menggaji karyawan, membesarkan perusahaan, dan menaikkan valuasi media itu. Setiap investor membutuhkan medianya tumbuh. Kadang memang tak peduli dengan caranya.

Kalau tema soal terorisme yang digoreng oleh Tribun kita pindahkan ke tema lain, tampaknya akan banyak media yang memang mirip tuyul. Ada yang sengaja menggoreng isu ekonomi, agama, politik, dan lain-lain. Kecenderungan melebarkan tafsir, kesan sok politis, dan berlebihan dalam hal intelektual untuk suatu tema, pun niatnya juga mirip. Supaya ramai. Supaya banyak yang meng-klik tautan yang disebar. Supaya banyak yang berkunjung.

Maka, kita disuguhi pesta-pora dan perayaan hal yang menjijikkan di berbagai media. Kasus Habib Rizieq-Firza Husein dan kasus perceraian Ahok, misalnya. Keduanya punya derajat yang sama. Media yang mengunggah berulang kasus Rizieq-Firza sama sampahnya dengan yang mengunggah berkali-kali kasus perceraian Ahok. Kalau bukan atas nama klik, terus atas nama apa? Apa pentingnya mengunggah hal begituan?

Itu sama saja geheran di media sosial tentang Jokowi yang dibilang anak Cina plus PKI, dan yang bilang anak Prabowo adalah gay. Keduanya sama-sama sinting dan keji. Ini bukan soal Cina, PKI, atau gay. Tapi, apa urusannya hal itu dengan Jokowi dan Prabowo? Apa urusannya dengan dunia politik kita.

Balik lagi ke soal kritik Remotivi kepada Tribun. Kita butuh lembaga seperti Remotivi yang terus bersikap kritis pada berbagai media di Indonesia. Memang harus ada yang terus mengingatkan kita semua bahwa banyak media

online yang melampaui batas ketika membuat konten. Media, juga kita semua, butuh diingatkan dan dikritik. Karena kalau tidak, semua bisa kebablasan.

Namun, di atas semua itu, perlu kesadaran dari semua pihak untuk terus mengevaluasi diri. Bukan hanya Tribun. Jangan hanya karena hal yang keliru dilakukan oleh banyak media, lalu berubah menjadi lazim, bahkan benar.

Perlu ada dinamika dan penyegaran kesadaran atas semua pihak. Baik investor, pekerja media, maupun pengiklan, harus terus-menerus mau menerima kritikan meskipun memang terasa tidak adil karena berangkat dari pemikiran, “Kalau yang lain boleh, kenapa kami tidak?”

Kita butuh ekosistem media yang lebih sehat, apalagi di tengah arus kebencian dan logika serampangan yang membombardir setiap saat di dunia medsos. Mungkin harus ada kesadaran bersama para media online yang berlaku sebaliknya: tidak ikut menyiram bensin dalam unggun kebencian yang makin marak.

Lampiran 12. Pilpres 2019 dan Kondisi yang Dibikin Seolah-olah Negara Sedang Genting

Pilpres 2019 dan Kondisi yang Dibikin Seolah-olah Negara Sedang Genting

Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 perlu dibikin drama bahwa negara sedang genting. Agar para elite bisa merampok orang kaya, timses punya kesempatan mencopet dari elite, begitu seterusnya sampai bawah.

Sebetulnya, dari keseluruhan drama menjelang pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), semua politikus, elite politik, akademisi, dll, sudah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang sedang ramai belakangan ini hanya drama yang dibikin seakan-akan kondisi negara sedang genting. Kondisi yang sebenarnya dibikin supaya semua bisa dapat keuntungan dari hajatan ini.

Pertama, hampir pasti Jokowi akan menang dan jadi presiden lagi. Ibarat perjudian, bandar pasang angka voor mentok. Kalau perlu penjudi pasang sejuta, kalau menang mau dikasih 10 juta, tapi belum tentu ada yang mau pasang.

Kedua, kalau ada elite politik dan partai politik (parpol) yang masih berebut jadi capres atau cawapres, itu semua dalam konteks supaya ada tambahan pada perolehan suara partai masing-masing. Jadi jangan dipikir kalau misal Prabowo Subianto atau siapapun yang maju, lalu dengan serta merta mereka benar-benar bertanding untuk menang. Bisa pula dibaca, para penantang Jokowi ini muncul supaya raihan suara parpol yang diusung atau mengusung mereka bisa ikut naik. Setidaknya tidak tergerus atau menurun.

Ketiga, kalau bisa dapat jatah kursi menteri. Dukung-mendukung capres-cawapres pada akhirnya akan tiba pada obrolan bagi-bagi kursi menteri. Setelah itu kursi-kursi lain seperti komisaris BUMN, amtenar di kementerian, dan badan-badan atau lembaga pemerintah lainnya.

Oleh karena itu, momentum seperti pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres ini harus dibuat genting supaya ada alasan bagi elite politik untuk memungut uang dari para konglomerat di Indonesia. Sebab kalau tidak ada keadaan seperti itu, kendaraan politik akan kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar.

Sementara itu, bagi para relawan, situasi ini merupakan kesempatan untuk menaikkan nilai tawar, peluang untuk naik level, atau kalau mau disebut secara blakblakan; potensi untuk memperkaya diri. Kondisinya elite merampok orang kaya, timses mencopet dari elite, begitu seterusnya sampai bawah.

Lalu ketika hajatan politik ini rampung, kelompok-kelompok ini akan sama-sama bisa merampok sumber daya alam negeri ini. Meski tentu tidak semuanya seperti itu, tapi bukankah pola itu tampak nyata pada praktik sehari-hari elite kita? Coba saja perhatikan aktor-aktor yang ditangkap KPK. Siapa mereka dan apa peran mereka saat hajatan pemilu dari tahun politik ke tahun politik.

Lalu ketika keadaan sudah demikian apakah rakyat kemudian susah? Ya belum tentu.

Sebagian rakyat mungkin masih susah, sebagian lagi merasa tidak. Karena harus diakui, rakyat kita punya cara bertahan hidup yang luar biasa. Pagi hari uyel-uyelan naik KRL dan angkot, lalu tenaganya diperas di kantor dengan tingkat kompetisi keras, pulang larut malam. Sudah begitu ke mana-mana macet. Habis diperas lagi. Begitu bangun tidur, sudah tancap gas lagi. Siap gencet-gencetan lagi di KRL. Berpuluh-puluh tahun seperti itu. Kuat.

Sementara yang di desa? Kerjaan kadang tak jelas, punya anak dan istri, punya tanggungan kredit sepeda motor, tapi tetap masih sempat ke warung kopi, kebal-kebul udud, cengengesan bersama kawan-kawan. Rakyat memang punya seleranya masing-masing untuk bahagia.

Jadi, bisa dikatakan hajat Pilpres 2019 itu sudah bermuara. Keadaan saat ini seakan genting kan karena ada banyak orang merasa butuh cari makan pada momentum seperti ini. Cari proyekan. Kalau tidak dibikin seakan genting, adem-ayem, lalu kapan mereka dapat kena cipratan rezeki?

Sudah gitu saja. Nggak usah dipahami terlalu rumit. Namanya juga pesta demokrasi. Kalau tidak dapat daging pesta ya setidaknya dapat remahan roti, apesnya ya cuma dapat remukan kerupuknya. Yang penting: kriuk, kriuk. Semua senang semua kenyang.

Lampiran 13. Makin Terisolasinya Jokowi dan Prabowo dalam Masyarakat yang Letih

Makin Terisolasinya Jokowi dan Prabowo dalam Masyarakat yang Letih

“Jika Jokowi dan Prabowo maju di 2019, yang itu hampir bisa dipastikan, mereka tak bisa dan sebaiknya tidak mengulang strategi lama mereka di 2014.”

Hampir pasti Prabowo bakal berhadapan lagi dengan Jokowi di pilpres 2019. Kali ini situasinya sama sekali berbeda dengan situasi sosial pada laga pertama tahun 2014 lalu.

Pengantar paling panas laga ini adalah gelaran pilgub DKI yang akhirnya mengantarkan Anies Baswedan sebagai gubernur terpilih dengan mengandaskan Ahok. Sisa dentang lonceng usai pertandingan masih berdenging sampai hari ini. Dan pengantar kedua bersiap menyambut: pilkada serentak tahun 2018 yang tidak akan lama lagi digelar.

Lewat dua pemanasan itu, kondisi sosial masyarakat Indonesia tentu saja dalam situasi panas yang berlebihan. Dalam situasi panas yang berlebihan itu, jika tarung ulang Jokowi vs Prabowo tidak digelar dengan cerdas dan menarik, besar potensinya akan terjadi dehidrasi dan kelelahan psikis pada masyarakat pemilih. Konsekuensi politiknya bisa buruk: pertama, politik irasional lebih utama. Atau yang kedua, masyarakat makin apolitis.

Mari kita lihat lebih jauh lagi. Ada beberapa hal yang mesti dilihat dengan jeli. Hampir bisa dipastikan dari sisi isu, dua kubu akan menggotong isu yang sama baik ketika pilpres 2014 maupun pilgub DKI 2017 lalu. Di kubu pendukung Prabowo, isu agama dan PKI akan tetap dominan. Sementara kubu pendukung Jokowi akan tetap mengusung isu kebinekaan dan HAM.

Tapi, sebetulnya isu itu justru akan merugikan pihak masing-masing. Isu agama misalnya, tidak bisa dipakai untuk menghajar Jokowi sebab Jokowi beragama Islam. Bahkan bukan hanya memeluk agama Islam, dia sejak dulu dikenal sebagai seorang muslim yang taat. Mau dipojokkan seperti apa pun, isu ini tidak akan membuat Jokowi kepepet. Isu PKI juga sudah terbukti tidak bisa dipakai untuk menjegal Jokowi. Pada tahun 2014 isu itu sudah digunakan dan terbukti gagal. Hanya ketololanlah jika kedua isu ini dipakai lagi oleh pendukung Prabowo.

Sementara itu, isu kebinekaan yang diusung oleh pendukung Jokowi juga bakal kontraproduktif. Sebab, tangkisan atas isu ini sejak awal sudah mudah sekali dipatahkan. Klaim diri bahwa pendukung Jokowi sebagai yang pro-kebinekaan dan pluralis justru seperti menunjuk muka bahwa mereka tidak pluralis dan cenderung fasistik.

Kegagalan itu mudah sekali dilihat jejaknya dalam pilgub DKI, karena begitu mudahnya pendukung Ahok mengeksploitasi pluralisme dan kebinekaan, tapi watak politik mereka menunjukkan sebaliknya, maka lepaslah sebagian besar potensi pemilih masyarakat sipil. Isu HAM juga tidak lagi bisa dipakai untuk menghajar Prabowo. Alasannya juga mudah, selama pemerintahan Jokowi berlangsung, tidak ada upaya dari pemerintah untuk menyeret Prabowo sesuai tuduhan. Jadi, ketika diulangi lagi isu ini, bukan saja akan aus, melainkan bisa jadi bumerang bagi pendukung Jokowi.

Sekarang yang jadi masalah adalah dalam dua kutub pendukung ini, ada bagian yang gemuk di tengah. Bagian gemuk ini lebih mudah berpindah posisi dan pilihan. Sekaligus mudah terdehidrasi dan letih.

Dari berbagai survei jelas sekali. Misalnya, kenapa jarak antara persentase orang yang puas dengan kinerja Jokowi begitu jauh dengan elektabilitas Jokowi.

Artinya, mereka puas dengan Jokowi tapi kalau ada pilihan yang lebih baik, mereka tidak akan memilih Jokowi lagi.

Survei itu memang tidak mungkin terjadi pada Prabowo. Sebab dia tidak sedang memimpin. Mau diuji dengan alat survei apa untuk menunjukkan tingkat kepuasan publik?

Namun, cair dan gemuknya masyarakat pemilih ke tengah itu tidak bisa dimungkiri. Sebab, ada fakta statistik lain yang terjadi pada Prabowo. Berbagai survei menunjukkan bahwa pemilih Prabowo pada tahun 2014 sudah tidak punya interest yang sama untuk memilih Prabowo lagi. Bahasa mudahnya, Prabowo juga punya kecenderungan ditinggalkan basis pemilih lamanya dengan berbagai pertimbangan.

Pada titik inilah kedua kubu harus hati-hati dalam menerapkan strategi. Artinya, akan tiba saatnya nanti, pendukung kedua kubu akan mengerucut di dua kutub yang berlawanan, tapi makin mengecil dan makin terisolasi dari masyarakat pemilih. Apalagi jika jargon dan strategi mengusung isu lama dilakukan lagi (isu agama dan PKI pada pendukung Prabowo, dan kebinekaan dan HAM pada kubu pendukung Jokowi).

Terisolasinya pendukung kedua kubu secara otomatis juga mengurung dan mengisolasi Prabowo dan Jokowi.

Kedua pendukung itu makin terisolasi lagi jika misalnya pendukung Jokowi menggunakan sentimen pembabatan dan pembungkaman suara kritis masyarakat sipil, entah itu atas nama istana, stabilitas politik, atau apa pun. Ini sudah sering terjadi. Bahkan pendukung Jokowi sendiri sudah banyak yang jengah dengan strategi seperti ini, karena pasti akan merugikan Jokowi. Ini norak sekali. Dalam bahasa verbal, “Kalau menjilat, mbok jangan berlebihan lah....”

Cara-cara merisak para aktivis, tokoh masyarakat, dan ilmuwan yang kritis terhadap Jokowi dianggap sebagai hambatan. Itu ketololan besar. Sebab dalam demokrasi elektoral, kritik tidak selalu identik dengan preferensi pemberian suara. Jokowi dikritik tapi tetap dicoblos. Tapi, kalau pendukungnya membungkam mekanisme demokratis ini, Jokowi akan ditinggalkan pendukung kritisnya. Memang tidak serta-merta suara pendukung kritis akan diberikan kepada lawan Jokowi. Tapi, absennya mereka, bakal menjadi malapetaka bagi Jokowi

sebagaimana malapetaka saat pilgub DKI lalu. Barangkali pendukung Jokowi harus lebih mengenal lagi watak masyarakat sipil Indonesia, dan arti apa itu “pendukung kritis”.

Hal yang sama terjadi juga pada pendukung Prabowo. Politik identitas memang mengemuka. Tapi, Indonesia bukan Jakarta. Pilpres 2019 tidak sama dengan pilgub DKI 2017. Kalau isu agama dijadikan sajian utama, masyarakat pemilih justru makin menjauh dari Prabowo. Terlebih ada sederet kejadian yang menautkan langsung antara tidak sehatnya agama dijadikan isu politik dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Indonesia sudah tumbuh makin sehat secara intelektual. Cara-cara lama yang dikemas ulang, justru akan menghajar balik kreatornya.

Kekeliruan menerapkan strategi kedua kubu makin jelas bakal berpotensi merusak dan mengisolasi Prabowo dan Jokowi. Sementara, sampai hari ini, realitas politik hanya menunjukkan kedua calon inilah yang berpotensi besar untuk saling berhadapan. Tidak ada atau belum ada calon alternatif lain. Kalaupun toh ada, potensi terpilihnya kecil sekali.

Dan hal lain yang patut diwaspadai adalah ketika masyarakat mengalami “keletihan politik”. Sisa pertarungan pilgub DKI 2017 belum usai, disambung pilkada serentak 171 wilayah, dan dilanjutkan lagi dengan perhelatan pilpres-pileg serentak 2019.

Keletihan ini, ditambah menjauhnya masyarakat pemilih pada kutub yang berhadapan, plus luka yang makin sulit sembuh, akan menatah sekelompok besar pemilih Indonesia dalam dua pilihan yang tidak sehat: irasional dan apolitis.

Hal ini sudah mulai tampak pada berbagai penelitian via dunia medsos, orang yang terlalu banyak bicara politik elektoral akan dibisukan, di-unfollow, dan tidak disukai. Kalau hal semacam ini tidak dilihat dengan cermat, pertarungan pilpres 2019 akan rendah peminat dan tingkat destruksinya makin tinggi. Karena masyarakat apolitis dan irasional, tidak mudah dipetakan pergerakannya.

Tapi ini lagi-lagi bukan salah mereka. Mereka hanya letih saja. Dan makin letih karena menghadapi strategi norak dan lebay pendukung kedua kubu. Lebih tepatnya lagi, dipaksa menjadi letih oleh kebodohan strategi politik kedua kubu.

Mumpung masih cukup waktu, sebaiknya kreator strategi kedua pihak melakukan penyegaran tema, cara pandang, dan pola pendekatan. Sebab, Indonesia bukan hanya butuh pemilu, tapi juga butuh demokrasi yang bermutu.

Lampiran 14. Agus Mulyadi dan PKS

Agus Mulyadi dan PKS

Ketika Agus Mulyadi diangkat sebagai pemred Mojok, banyak orang bertanya kepada saya: Kenapa Agus Mulyadi? Bukankah dia kader PKS?

Saya akan menjawab di sini. Supaya jelas. Juga supaya adil.

Pertama, Agus Mulyadi bukan kader, tapi dia mencoblos PKS. Terus apa yang salah? Mencoblos adalah hak warga negara. Agus sendiri hanya menggunakan haknya. Lalu di mana salahnya? Bukankah PKS memang partai yang legal?

Kedua, Agus tidak munafik. Dia tidak peduli orang mau mengejek dirinya. Sejak saya mengenal dirinya, Agus selalu jujur kepada siapa saja bahwa dia mencoblos PKS. Alasannya sederhana tapi penting. Dia pernah ditolong oleh tetangganya yang merupakan kader PKS.

Saat masih pengangguran, Agus diberi pekerjaan dan dibiayai kursus komputer. Orang ini juga dikenal banyak menolong orang lain di kampung Agus. Sampai di sini, di mana kekeliruan Agus? Dia mencoblos orang yang dia kenal, yang dianggap baik dan amanah. Agus percaya bahwa hal apa pun yang dilakukan di hidup ini akan diminta pertanggungjawabannya di depan Tuhan nanti. Dia juga merasa harus mempertanggungjawabkan hal coblosnya.

Saya tidak pernah ikut pemilu legislatif. Alasan saya juga sederhana tapi prinsipil: karena saya tidak merasa kenal calon-calon yang ada di daftar calon legislatif. Kenapa saya harus mencoblos? Bagaimana saya bisa memberikan amanah kepada orang yang tidak saya kenal? Saya tidak mau.

Suara saya memang hanya satu, tapi saya punya kesadaran politik yang membuat saya tak mau pergi ke bilik suara. Saya juga tidak punya kedekatan emosional dan politik dengan partai-partai yang ada. Tambah kokoh alasan saya untuk tidak mencoblos.

Ketiga, Agus dibilang sering mengisi kegiatan di PKS. Iya. Itu benar. Tapi jangan salah, semua partai yang meminta Mojok mengisi materi, entah workshop atau seminar, pasti dilayani. Siapa pun. Dari partai mana pun. Dan asal tahu saja, Agus juga pernah mengisi acara di KSP (Kantor Staf Presiden).

Keempat, kita sering gegabah menilai bahwa sikap seseorang pada satu hal itu konsisten dan menyeluruh. Di Indonesia, tidak seperti itu. Agus salah satu contohnya. Dia mencoblos PKS, tapi ketika pilpres mencoblos Jokowi.

Coba lihat berbagai hasil survei yang ada di Indonesia. Jokowi banyak dicoblos oleh warga yang mencoblos partai-partai yang justru tidak mengukung dirinya. Juga sebaliknya. Banyak juga orang yang mencoblos PDIP, lalu memilih Prabowo. Harus lengkap ketika membaca hasil survei agar makin memahami sikap perilaku warga negara.

Kelima, ini yang paling menjengkelkan: Agus berjenggot. Terus kenapa kalau Agus berjenggot? Dia mempercayai itu perilaku sunah. Itu ekspresi dari kayakinannya. Dia tidak pernah sinis mengejek orang tak berjenggot. Saya pribadi menghormat ekspresi Agus. Tidak pernah menghina jenggot Agus sebagaimana saya tidak menghina orang berjilbab, tatoan, bercelana cingkrang, bertindik, gondrong, dll. Suka-suka mereka. Setiap orang berhak mengekspresikan keyakinan dan yang mereka sukai. Kenapa harus cerewet amat dengan ragam ekspresi orang?

Itu jawaban saya. Lain soal kalau kemudian Agus membuat Mojok menjadi media yang pro-PKS. Kalau itu yang dia lakukan, saya yang akan pertama mengadangnya. Sebab Mojok dibuat memang bukan untuk dukung-mendukung politik elektoral. Tidak untuk kepentingan semacam itu.

Itu jawaban saya. Kalau kalian tidak suka dengan PKS, saya pribadi juga cenderung tidak suka, dan tidak suka dengan semua partai politik. Tapi kalau mereka datang ke kantor Mojok, saya meminta semua harus diterima dengan baik. Wajib hukumnya menerima kedatangan orang, bersikap baik dan memuliakan tamu.

Kalau kalian mau menurunkan suara PKS, silakan saja. Itu juga boleh. Itu bagian dari pertarungan politik. Kalau ingin membubarkan PKS, saya tidak ikut-ikut. Saya tidak suka politik bubar-bubaran. Kalau hanya menuruti keinginan

membubarkan, rasanya semua partai politik ingin saya bubarkan. Tapi apa hak membubarkan mereka?

Begitu dulu ya. Ini penjelasan yang semoga mudah dimengerti. Kalau tetap tidak bisa dimengerti ya mau bagaimana lagi. Hal itu mungkin sudah masuk ke persoalan kemampuan berpikir.

Lampiran 15. Beberapa Hal yang Luput dari Perhitungan Jenderal Gatot Nurmantyo

Beberapa Hal yang Luput dari Perhitungan Jenderal Gatot Nurmantyo

Sebagai seorang Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo nyaris ideal. Dia digambarkan dekat dengan anak buahnya. Berani bicara di depan publik. Gaya bicaranya tegas. Pemikirannya jelas. Dan dia punya nyali. Tapi publik juga tidak keliru jika menganggap semua manuver yang dilakukan oleh Sang Jenderal lebih didorong oleh keinginannya menjadi Presiden, atau setidaknya Wakil Presiden.

Apakah keinginan itu keliru? Jelas tidak. Di negara demokrasi, keinginan semacam itu tidak bisa dipersalahkan. Tapi menjadi keliru jika melanggar adat dan aturan main demokrasi. Salah satu hal yang dianggap melanggar adat itu dalam kasus Jenderal Gatot adalah merasa tidak di bawah ‘kendali’ Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam.

Awalnya, Jenderal Gatot mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Dan setiap pujian selalu menggembungkan rasa percaya diri. Namun rasa percaya diri yang berlebihan sering kali justru membuat salah langkah.

Menjadi politikus di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan keberanian. Hal itu yang tampaknya belum dipahami oleh Jenderal Gatot.

Di negeri ini, sudah terlalu banyak kisah tentara yang hendak menjadi politikus gagal karena hanya mengandalkan keberanian. Terlebih di era demokrasi langsung.

SBY mungkin bisa menjadi contoh. Dia tidak mengandalkan keberanian dalam berpolitik. Dia bertarung, kalah, lalu memulai dari awal membangun Partai Demokrat. Cerita selanjutnya kita tahu sendiri apa yang terjadi.

Apa yang pernah dilakukan oleh SBY tampaknya tidak menjadi model bagi Jenderal Gatot. Dia mungkin berpikir, dalam situasi politik yang agak panas ini, manuver-manuvernya akan mendulang dukungan dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Anggapannya, dukungan itu akan memberinya tiket premium untuk masuk ke gelanggang politik 2019.

Tapi dalam waktu singkat Jenderal Gatot sudah harus repot. Serangan kepadanya berhambalang dari segala penjuru. Termasuk dari pihak-pihak yang semula dia anggap bakal mendukungnya.

Lalu apa yang lupa diperhitungkan oleh Jenderal Gatot? Beberapa poin berikut ini mungkin bisa dijadikan rujukan atau pertimbangan Sang Jenderal.

Politikus dari Parpol

Pemilu 2019 adalah antrean orang menjadi Wakil Presiden. Sebab jelas, kemungkinan hanya ada dua kandidat kuat yang akan bertarung lagi di Pilpres 2019: Jokowi dan Prabowo Subianto.

Para elite politik lain masih harus berdiri di antrean menjadi Cawapres kedua sosok tersebut. Karena masing-masing hanya bisa didampingi satu Cawapres, pertarungan menjadi orang yang akan ditandemkan dengan Jokowi atau Prabowo jelas sangat ketat.

Kehadiran Jenderal Gatot sudah tentu dianggap mengganggu konstelasi perebutan antrean ini. Sebab bagaimanapun, tiket politik di era sekarang ini dimiliki oleh partai politik. Para politikus tentu gerah dengan kehadiran Sang Jenderal yang tidak pernah mengalami jatuh-bangun pertarungan politik, dan terutama jatuh-bangun dalam membesarkan partai.

Jenderal Gatot mungkin lupa, Cak Imin dari PKB juga ingin jadi Cawapres. Bahkan Hary Tanoe dengan partai barunya juga pengen menjajal keberuntungan. Surya Paloh dari Nasdem sudah tentu tidak akan merelakan begitu saja jabatan Cawapres kepada sosok di luar partai. Hampir semua politikus partai hakulyakin tidak akan merelakan hal ini terjadi.

Bahkan jika kelak Sang Jenderal pensiun pun, lalu masuk ke salah satu Parpol, tidak bisa serta-merta didapuk jadi Cawapres.

Berpolitik memang tidak untuk mendapatkan jabatan, tapi kita tahu slogan itu hanyalah pepesan kosong. Sebab berpolitik ya memang untuk mendapatkan jabatan politik. Apakah dapat betulan atau tidak, itu soal belakangan.

Supremasi Sipil

Ketika Orde Reformasi terjadi, supremasi sipil jelas menjadi kaidah politik bersama. Tentara boleh berpolitik, tapi tunggu pensiun dulu. Kalau tentara aktif dianggap melakukan manuver politik, para politikus akan bersatu.

Ada begitu banyak gagasan politik berbenturan di era pasca-Reformasi. Tapi tidak ada suara nyaring yang mendukung kembalinya Dwi Fungsi ABRI (sekarang TNI). TNI boleh punya nilai plus dalam berbagai jajak pendapat masyarakat dalam hal kelembagaan, tapi bukan berarti dipersilakan berpolitik seperti dulu lagi.

Aturan mainnya sudah jelas, dan sudah banyak pensiunan Jenderal yang mengikuti prosedur demokrasi ini.

Para intelektual dan aktivis memang tercerai-berai ketika menghadapi Pilpres 2014 silam, dan Pilkada DKI tahun ini. Tapi untuk urusan supremasi sipil di era demokrasi, tampaknya tak ada yang berbeda suara. Kalaupun ada yang berbeda, pastilah amat kecil jumlahnya.

Mungkin Jenderal Gatot lupa, AHY ‘disipilkan’ supaya bisa bertarung dalam Pilgub DKI. Dia taat aturan main dan mengambil keputusan yang tidak mudah. Kalau militer balik lagi ke gelanggang sipil, SBY dan AHY sudah pasti paling keberatan. Sudah keluar masak balik lagi?

Angkatan Lain Diuntungkan

Mungkin banyak orang bertanya-tanya, kenapa manuver Jenderal Gatot tidak mendapatkan sambutan positif bahkan dari kalangan tentara sendiri. Kenapa cuitan admin Twitter AU langsung menanggapi dengan nakal pernyataan Jenderal Gatot soal 5000 senjata yang dipesan secara gelap itu.

Mungkin banyak yang lupa bahwa salah satu buah Reformasi dinikmati oleh angkatan lain. Angkatan Udara dan Angkatan Laut di era Orde Baru dianggap sebagai angkatan yang dipinggirkan perannya, di era Reformasi justru diberi perhatian yang lebih. Kepolisian memang ‘disipilkan’, tapi proses tersebut bukan dianggap penyingkiran melainkan sebuah berkah.

Maka tidak heran, manuver Jenderal Gatot mendapatkan perlawanan dan pembangkangan dari kedua angkatan. Terlebih pihak Kepolisian. Tidak usah dibilang bakal diserbu pun, Kepolisian bakal paling depan menghadang manuver Jenderal Gatot jika melebihi batas kewenangan dan di luar mekanisme Pemerintahan yang sah.

Norma Kepantasan

Bagaimanapun tegas dan beraninya Jenderal Gatot, belum tentu mendapatkan apresiasi yang baik dari publik. Masyarakat punya norma dan nilai kepantasannya sendiri.

Seorang pimpinan yang tidak patuh, atau dinilai tidak patuh kepada pimpinan yang lebih tinggi, sulit mendapatkan apresiasi. Keberanian itu ditujukan buat kewajiban dan tanggung jawab, bukan untuk berhadapan dengan atasan.

Menteri Susi Pudjiastuti, misalnya, mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat karena keberaniannya memerangi pencurian ikan. Bukan karena Menteri Susi berani melawan Presiden.

Tentu saja Jenderal Gatot tidak secara ekspisit melawan Presiden Jokowi. Tapi pernyataannya terhadap Menhan, dan bantahan Menkopolhukam atas pernyataan-pernyataannya, bisa diresepsi oleh publik sebagai pembangkangan atas pimpinan.

Publik kita juga punya norma waktu. Tidak buru-buru. Tidak nggege mangsa karena toh semua akan pantas dilakukan jika Jenderal Gatot sudah pensiun atau tidak lagi menjadi Panglima TNI.

Citra membangkang terhadap atasan dan nggege mangsa inilah yang makin melemahkan daya dukung masyarakat terhadap Jenderal Gatot.

Politik memang bukan barang gampang. Karena itu perlu dipelajari. Namanya belajar, pasti melewati banyak kekeliruan. Masalahnya tinggal bagaimana kekeliruan itu diakui, sebagai perwujudan sikap berani yang sudah kadung menjadi label Sang Jenderal.

Kalau Jenderal Gatot berani mengaku keliru, publik mungkin akan cepat melupakan dan malah mengapresiasi hal itu. Sebab di mata masyarakat, berani mengakui kekeliruan dan meminta maaf adalah sikap kesatria. Sikap yang tidak mudah, tapi sungguh mulia.

Lampiran 16. Drama Gerindra dan Uang Mahar dalam Politik Kita

Drama Gerindra dan Uang Mahar dalam Politik Kita

“Jangan sok suci. Demokrasi kita memang mahal. Dan uang mahar adalah salah satu yang membiayainya.”

Pilgub Jatim memulai babak baru dengan dua hal: Gus Ipul-Puti Soekarno bertarung melawan Khofifah-Emil Dardak, dan mencuatnya “uang mahar” yang konon diminta oleh Prabowo Subianto kepada La Nyalla Mattalitti. Jumlahnya terkesan fantastis: ratusan miliar rupiah.

Tentang uang mahar pilkada sebetulnya bukan hal asing di telinga kita. Tapi seperti kentut. Baunya tercium, sementara bendanya tak kelihatan.

Beberapa hari lalu, salah seorang pemerhati politik Indonesia yang sangat otoritatif, Burhanudin Muhtadi, dalam acara Indonesia Lawyers Club, menyatakan keprihatinannya soal pilkada. Salah satu poinnya terkait dengan politik uang, yang kebetulan menjadi tema disertasinya.

Menjelang akhir pemaparannya, ada dialog menarik antara Burhan dengan Karni Ilyas selaku pemandu acara. Kira-kira begini: Apakah Burhan tahu mengenai berapa banyak uang yang dihabiskan oleh para calon, termasuk tentu saja untuk mahar? Burhan menggelengkan kepala, sembari berkata mungkin kajian tentang politik uang akan lebih bagus kalau ada para politikus yang beralih menjadi pengamat politik. Kemudian Karni dengan bagus sekali menutup: coba wawancara saja dengan para calon yang kalah berlaga dalam pilkada.

Dari dialog ini saja kita akan sama-sama mafhum bahwa sebetulnya Burhan tahu ada uang mahar dan lain sebagainya. Hanya saja sebagai intelektual, dia membutuhkan kecukupan bukti untuk bisa memaparkan hal itu. Sementara Karni sebagai wartawan senior, secara tidak langsung bilang: semua itu ada, kalau tidak percaya wawancara saja mereka yang kalah.

Iya. Pasti yang diwawancara yang kalah. Kalau yang menang pasti tidak bakal mengaku. Kalau bisa, bahkan para pemenang hanya butuh kesucian dan ridha Tuhan dalam menggenggam kemenangan mereka.

Masalahnya, di Indonesia ada ratusan pilkada dan sudah dihelat hampir 3 kali. Ada puluhan bahkan ratusan ribu politikus dari tingkat daerah sampai pusat. Artinya, politik uang termasuk mahar bukan barang yang susah untuk dikenali.

Aromanya telanjur menjalar ke berbagai penjuru. Terlalu menyengat untuk ditutup rapat.

Masalahnya adalah apakah uang mahar itu? Dan apakah hanya Partai Gerindra saja yang melakukannya?

Kita jawab dari yang terakhir dulu. Misalnya benar bahwa uang mahar itu ada, apakah Partai Gerindra satu-satunya yang menjalankan prosedur itu?

Saya tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Semua pembaca yang pernah menjadi calon yang berlaga dalam pilkada, para politikus, dan bahkan para anggota timses tentu hanya tersenyum belaka. Jadi kalau ada orang yang mengejek Gerindra seandainya apa yang diomongkan La Nyalla itu benar adanya, sesungguhnya dia harus siap dengan fakta bahwa semua partai pun melakukannya. Tanpa terkecuali.

Lalu apakah uang mahar itu? Dan biasanya untuk apa saja?

Sebetulnya pilkada itu menurut saya adalah “pilkades yang diperluas”. Infrastruktur politik dan organisasi kerjanya identik dengan pilkades minus Parpol. Di sana ada calon, botoh, makelar, beking, timses, dan rakyat yang “disuap”. Maka, agak mengherankan jika fenomena memberi uang pada hajatan pilkada dianggap sesuatu yang baru dalam sistem politik kita. Jauh tahun sebelum pilkada ada, di pagelaran pilkades, sangat biasa rakyat pemilih dapat amplop untuk mencoblos.

Sekarang mari kita mulai apa saja sih uang mahar dan peruntukannya?

Kita mulai dari yang paling sederhana: pertama, membeli kebijakan dan keputusan parpol. Kebijakan ini biasa disebut “rekom”, kependekan dari “rekomendasi”.

Parpol diisi oleh para politikus. Mereka semua butuh makan, dan bukan hanya itu: butuh hidup. Sukur kehidupan yang mewah. Mereka menjalankan kehidupan berpartai dengan tidak mudah. Bertarung secara internal, bertarung antar-parpol, yang semua itu membutuhkan uang. Ada banyak tulisan yang menyatakan bahwa iuran anggota pada parpol itu hanyalah isapan jempol belaka. Walaupun ada, sumbangsuhnya sangat kecil. Ibarat hanya bisa untuk membeli tisu dalam sebuah makan malam dengan menu kambing guling.

Parpol memiliki kekuatan lain, yakni mengumpulkan sejumlah pundi secara tidak resmi. Hal yang jelas dan kasat mata adalah kasus-kasus yang diketok di KPK, yakni dari mesin pemerintahan dan birokrasi. Ada juga yang lain, misalnya dari pengusaha. Menjadi pengusaha di Indonesia, apalagi jika kaya, itu artinya Anda wajib menyisihkan uang untuk menyumbang parpol sekalipun parpol itu tidak Anda sukai. Lalu ada sumbangan lain, salah satunya dari pilkada.

Kedua, belum tentu juga uang mahar itu untuk orang per orang di dalam partai. Lihat saja yang dipaparkan oleh pihak Gerindra ketika diminta klarifikasi soal ocehan La Nyalla: ada lebih dari 68.000 TPS. Kalau dalam satu TPS ada dua saksi, dan masing-masing saksi dibayar 200 ribu rupiah, maka... Silakan ambil kalkulator Anda.

Itu baru saksi. Padahal saksi itu hanya sekian jam bekerja. Sementara ada lebih dari 100 hari pertarungan yang ketat. Butuh baliho, spanduk, kampanye langsung dan tidak langsung, termasuk membayar survei, konsultan politik, timses, dan jangan lupa: buzzer. Silakan ambil kalkulator lagi.

Jadi wahai buzzer, sudahlah, lebih baik berhenti dalam mencerca Partai Gerindra. Sadarilah bahwa uang yang dipakai untuk membayar Anda itu jangan-jangan ya dari mahar politik itu. Kalaupun tidak ya dari pengusaha yang mungkin “terpaksa” menyumbang. Sudahlah, tidak ada yang merasa paling suci kalau bicara soal politik di negeri ini.

Ketiga, ini juga sangat penting: uang yang dipakai untuk membeli suara rakyat. Tentu saja jumlahnya besar sekali. Kalau satu orang dikasih 50 ribu rupiah saja, berapa banyak yang harus dikeluarkan dalam pilkada di Jabar, Jatim, Jateng dan daerah lain....

Jadi menurut saya, apa pun yang dimaksud dengan mahar dan daftar peruntukannya untuk apa saja, yang jelas: demokrasi di Indonesia adalah barang mahal. Dan jangan dilupakan, itu sudah terjadi sejak dulu, sejak ada pilkades. Ini bukan fenomena sosial yang serba-ujug-ujug.

Seorang calon kepala desa di Jawa bisa mengeluarkan uang 200 s.d. 400 juta. Itu pun belum tentu menang. Untuk desa yang kaya bisa di atas 500 juta. Bahkan ada yang di atas 1 miliar. Itu baru kepala desa.

Lalu bagaimana dengan bupati, wali kota, dan gubernur?

Di sebuah kabupaten yang kecil di Jawa, jika ada calon bupati mengaku hanya mengeluarkan 10 miliar, saya kira dia menutupi banyak hal. Lalu bagaimana dengan daerah kaya, dan bagaimana dengan gubernur?

Jika Anda bertanya, apakah semua calon pasti begitu, atau bisa diperlakukan seperti itu? Jawaban saya: mungkin tidak. Tapi, biaya itu pasti ada. Mungkin bukan uang mereka sendiri, misalnya dikumpulkan dari banyak orang. Tapi mengumpulkan uang puluhan sampai ratusan miliar, jelas hanya ada dua kemungkinan.

Pertama: memeras. Kedua: membuat kesepakatan politik. Keduanya jelas tidak sehat bagi kehidupan berbangsa kita.

Bagaimana supaya sehat? Kalau Anda bertanya seperti itu kepada saya, saya langsung dengan tegas bilang, “Buang kalkulator!”

Apakah bisa?

“Bisa apanya?”

Dengan dibuang kalkulatornya, bisa tidak ada uang politik dan mahar?

“Lho, Anda ini gila. Kalau dibuang kalkulatornya, itu artinya tidak usah dihitung.”

Lho, berarti tidak bisa hilang?

“Haesembooh!”

Lampiran 17. Praktik Politik Orang Biasa

Praktik Politik Orang Biasa

Hari-hari ini, politik masih menjadi ‘perbincangan langit’: soal koalisi partai, otak-atik capres-cawapres, manuver elit, dll. Belum menjadi ‘obrolan bumi’, yakni politik yang kelak akan menggerakkan rakyat biasa untuk memilih siapa pasangan capres-cawapres yang mereka percaya.

Di kalangan petinggi media juga para lembaga survei, jamak diketahui bahwa salah satu hal yang paling susah dipindai adalah perilaku praktek politik orang biasa. Pada Pilgub DKI tahun lalu, angkanya cukup tinggi dan sangat menentukan kemenangan Anies-Sandi, yakni 17-18 persen. Angka inilah yang dulu mampu digerakkan oleh tim Anies-Sandi untuk mendudukkan pasangan itu sebagai pemenang.

Pada Pilpres kali ini, angka itu melebar karena cakupan wilayah dan kulturnya pun melebar, yakni 25-28 persen. Sungguh angka yang sangat fantastis. Kira-kira itulah yang membuat kenapa para konsultan politik dan lembaga survei lebih berhati-hati lagi dalam bekerja. Apalagi dengan pengalaman Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang hanya dalam hitungan hari memunculkan lompatan persentase suara pada Sudirman-Ida (Jateng) dan (Sudrajat-Saikhul) yang tinggi sekali, melampaui survei-survei yang pernah ada.

Dalam bahasa politik populer, ada sesuatu yang sedang berdenyut dan bergerak tapi sulit dipindai dan dipotret dengan baik. Dan acap kali perilaku politik mereka membuat kejutan politik karena persentasenya sangat tinggi.

Dalam politik di Indonesia, apa yang ada di langit elit, memang tidak mudah untuk dibawa turun ke bumi jelata alias orang-orang biasa. Hal yang kadang diberi predikat: awam. Mudah-mudahan, kita comot contoh dari ruang literasi media.

Misal, banyak pengamat media di Indonesia yang memandang sinetron sebagai tontonan yang tidak mendidik dan cenderung menghina akal sehat manusia. Kadang dianggap sebagai media pembodohan. Tapi apa yang terjadi pada masyarakat penonton sinetron yang jumlah mereka puluhan juta itu? Sinetron hanyalah tontonan biasa. Hiburan. Tidak lebih. Mereka tahu sinetron tidak membuat mereka lebih pintar, tapi juga tidak membuat mereka lebih bodoh. Jadi, apa yang ada dalam kepala intelektual, tidak mesti sejalan dengan apa yang ada di benak masyarakat. Ini bukan salah atau benar. Para ahli, secara konseptual benar. Sedangkan apa yang dirasakan masyarakat, secara faktual ada.

Demikian juga dalam ranah politik. Ada banyak hal yang mau digeser dan dipelintir, tidak akan mempan. Misal: bagaimana rezim Jokowi bisa mengontrol harga saat Lebaran lalu.

Para ibu di seluruh Indonesia, mau dibilang Jokowi ini atau itu, tidak penting buat mereka. Pengalaman politik (baca: ekonomi) mereka menyatakan bahwa mungkin dalam sepanjang sejarah lebaran di tanah air ini, rezim Jokowi-lah yang berhasil mengontrol harga dengan sangat baik di tahun ini. Anda mau tanya ibu-ibu di tingkat ranting dari PKS, Gerindra, atau Demokrat, mereka akan bicara sama.

Hal serupa terjadi pula dalam pengalaman mudik: pembangunan infrastruktur dan tidak macet. Orang mau membelokkan apapun, tapi secara faktual pengalaman tidak macet saat mudik dialami oleh puluhan juta orang. Termasuk infrastruktur. Mau uangnya dari utang atau apapun, mereka tidak peduli. Mereka hanya peduli pengalaman empirik bahwa jalan-jalan bagus, bandara banyak, stasiun makin bersih, pelayanan pelabuhan membaik. Titik. Tidak ada perdebatan. Yang ada perdebatan soal ini hanya di tingkat elit.

Itu dari sisi positif Pemerintahan Jokowi. Ada sisi negatif yang juga bisa mengancam Jokowi untuk terpilih lagi dari sisi pengalaman politik rakyat biasa. Apa itu?

Kesehatan. Jelas isu ini sangat berpengaruh besar atas penilaian rakyat pada rezim Jokowi. Orang yang lapar dan orang yang sakit, punya pengalaman empirik yang tidak bisa disulap sekejap mata. Pelayanan BPJS yang menurun kualitasnya atau hilangnya obat tertentu, misal obat untuk penderita kanker, bisa membuat rakyat biasa mengambil tindakan politik tanpa dipengaruhi faktor apapun. Mereka tidak butuh penjelasan. Pelayanan menurun, obat itu tak masuk daftar. Lenyap. Selesai.

BBM. Ini hal yang sama. Perdebatan soal pentingnya subsidi atau tidak, pasar BBM yang sehat atau tidak, itu bukan perdebatan bagi awam. Yang mereka saksikan adalah premium habis. Titik. Siapa pun tidak bisa menukar pengalaman ini dengan apapun. Habis ya habis. Faktanya begitu.

Pajak. Ini juga kerap membuat resah. Perilaku para pegawai pajak yang getol memburu wajib pajak. Ini bukan soal benar atau tidak. Ini soal apa yang dirasakan para wajib pajak. Jika wajib pajak di Indonesia yang diburu, direpoti atau dipersulit oleh pegawai pajak jumlahnya 1 juta saja, sedangkan rata-rata mereka punya pegawai 5-20, kalau kita ambil angka moderat: 10, maka ada 10 juta pemilih yang akan memilih berdasarkan keputusan atas pengalaman mereka saat diburu pajak. Ini bukan angka yang sedikit. Apalagi pengambilan asumsinya sangat moderat.

Tapi yang menguntungkan bagi Jokowi adalah rival politiknya tidak cepat mengeksploitasi isu itu sebagai senjata politik. Para rival Jokowi masih dengan bahasa level atas: anggaran bocor, BUMN banyak yang hampir bangkrut,

cadangan devisa menipis, dll. Mungkin itu benar. Tapi itu bukan tusukan ke jantung persoalan yang sedang dialami oleh rakyat biasa.

Itu artinya, Pemerintahan Jokowi masih bisa memperbaiki layanan dan persoalan yang menjadi pengalaman langsung rakyat biasa itu. Sebelum kelak bikin repot.

Lampiran 18. Catatan Politik 2018: Tahun Politik dan Posisi Gerakan Rakyat

Catatan Politik 2018: Tahun Politik dan Posisi Gerakan Rakyat

“Ada empat hal yang menyebabkan pemilihan umum memberi hasil yang itu lagi, itu lagi.”

Setiap kali hajatan politik hendak dimulai, antusiasme akan perubahan selalu mengemuka. Tapi, belajar pada empat kali pileg dan pilpres (tiga di antaranya dipilih secara langsung), maka ritual demokrasi langsung itu tak lebih dari ilusi jika kita tak tepat dalam menetapkan petanya.

Apa yang terjadi di tahun 2018 adalah pengantar untuk memasuki tahun politik 2019. Dengan 171 pilkada, disusul dengan perekrutan politik partai-partai untuk pendaftaran caleg, lalu pasti ada kerumunan timses pilpres, dan ya hasilnya bakal begitu-begitu saja....

Apa yang dimaksud dengan hasil begitu-begitu saja? Beberapa perwakilan kaum pergerakan atau masyarakat sipil akan ada yang menjadi wakil rakyat, akan ada yang menjadi menteri, akan ada yang menjadi komisaris BUMN, akan ada yang menjadi birokrat, tapi itu semua tidak memberikan akselerasi terhadap substansi agenda masyarakat sipil. Paling-paling hanya polesan sedikit saja, supaya wajah rezim, siapa pun rezim itu, terlihat lebih humanis.

Kenapa bisa begitu? Karena sesungguhnya yang sedang terjadi bukan prinsip perubahan sosial dalam konteks masyarakat sipil. Yang terjadi sesungguhnya hanyalah barter, atau hadiah, atau kalau lebih pas lagi, “permen untuk membungkam representasi dari masyarakat sipil” sebagai hadiah atas energi dan upayanya dalam membantu memenangkan kandidat. Itu berlaku untuk siapa pun yang kelak memenangi kekuasaan.

Karena pada dasarnya, yang diberi hadiah oleh rezim adalah orang, bukan lembaga, bukan pula warga negara. Diberi hadiah karena kehadiran mereka sebagai anggota tim sukses.

Karena hadiah itu untuk orang, maka berupa jabatan. Bukan agenda sosial. Bukan kebijakan dan program rezim.

Persoalannya, kenapa hal itu selalu terulang berkali-kali?

Pertama, karena pada dasarnya secara umum, gerakan masyarakat sipil di Indonesia nisbi lemah. Tidak punya nilai tawar untuk kegiatan politik elektoral. Komunitas politik masyarakat sipil tidak dianggap eksis dan berdaya oleh para elite.

Kedua, dalam gerakan masyarakat sipil tetap ada patronase dan figur politik. Ini pula yang kerap mencederai agenda gerakan masyarakat sipil. Ada deretan tokoh untuk isu-isu tertentu sehingga mudah “dibeli” oleh elite politik. Dengan mengambil satu atau dua orang tokoh, sebuah partai politik atau bahkan rezim politik bisa mendaku sudah melakukan bagian dari perubahan sosial.

Ketiga, gerakan masyarakat sipil gagal memaksimalkan ruang-ruang yang disediakan oleh rezim. Ruang-ruang kosong itu ada bukan karena kebaikan hati rezim, tapi memang didesakkan terus-menerus, dan kadang kala memang diciptakan oleh elite politik sebagai bagian dari ruang tawar antarmereka.

Misalnya soal BUMD dan dana desa. Sekalipun kebijakan ini tidak sempurna, tapi memenuhi hampir semua unsur gerakan masyarakat sipil. Tapi, siapakah yang memanfaatkan ruang ini? Siapakah yang menempatkan kader-kader terbaik gerakan rakyat di desa untuk memaksimalkan perubahan di tingkat akar masyarakat. Kalaupun ada, kecil sekali.

Keempat, masih berhubungan dengan poin ketiga, hal itu menunjukkan bahwa sejatinya, imajinasi gerakan masyarakat sipil sama dengan elite politik. Pergeseran kuasa hanya dianggap ada kalau yang berubah adalah siapa yang menjadipresiden, menteri, anggota dewan, dll. Itu sih perubahan nasib orang per orang....

Keempat poin itu sepertinya akan terus terjadi pada tahun 2018. Kemudian terjadi lagi pada tahun 2019, dan seterusnya.

Maka, yang pasti kemudian terjadi lagi dan lagi adalah perebutan dan pencaplokan sumber daya alam di mana saja, kebijakan pro-petani dan buruh nihil, cara pandang pemerintah terhadap BPJS tetap sama. Begitu terus. Terus begitu.

Maka, tahun 2018 akan menjadi tahun politik yang begitu-begitu saja. Paling ada yang jadi timses pilkada lagi, lalu nyaleg lagi, lalu tahun berikutnya akan ada yang jadi timses pilpres lagi, rebutan jabatan jadi komisaris lagi, jadi birokrat lagi.

Dan awal tahun 2019 nanti, saya juga akan membuat catatan politik yang mirip lagi....

Lampiran 19. Ajakan Ngopi untuk Bu Susi Pudjiastuti

Ajakan Ngopi untuk Bu Susi Pudjiastuti

Bu Susi...

Kalau ada waktu senggang, alangkah bahagia diri saya jika bisa ngopi bersama Anda. Karena Anda Menteri Kelautan dan Perikanan, maka lebih afdol jika kita ngopi di pinggir pantai di senja hari. Atau di geladak sebuah kapal Pinishi yang sedang mengarungi lautan di Maluku, sambil memasang pancing tentu saja.

Bu Susi, sudah lama saya mendengar nama Anda. Di sebuah stasiun televisi, saya lupa acara apa, beberapa tahun yang lalu, Anda ditanya: Apakah bisa berbisnis dengan bersih di Indonesia?

Saya berpikir waktu itu Anda akan menjawab normatif: bisa dan bla bla bla berkhotbah soal bisnis yang jujur, tertib dan tekun. Tapi justru Anda tanpa basa-basi saat itu menjawab, salah satu hambatan bisnis bersih di Indonesia adalah para pengusaha sering dipakai ‘mainan’ oleh birokrat dan politikus. Jadi nyaris mustahil berbisnis dengan bersih karena para pengusaha ‘dipaksa’ untuk menjadi kotor. Padahal pebisnis itu suka sesuatu berjalan efisien. Kotor itu tidak efisien.

Jawaban Anda itu membuat saya takjub. Anda tidak perlu menutupi realitas, dan tidak takut mengatakan yang sesungguhnya terjadi. Bagi para pebisnis, baik yang kecil-kecilan sampai para taipan, semua bisa mencerna dengan baik pengakuan Anda. Saya tidak mau mengatakan bahwa pebisnis pasti berniat bersih. Ada juga yang kotor sejak dari pikiran. Tapi saya menolak jika semua

disamaratakan: semua pebisnis berniat kotor dan curang. Roda ekonomi di negeri ini dijalankan sebagian besar oleh para pebisnis, baik yang skala trotoar sampai yang besar. Penjaja gorengan, pemilik kios rokok, pedagang sayur, penjual pecel lele di kaki lima, mereka juga pebisnis. Atau saya lebih suka menyebut dengan istilah wirausahawan.

Bu Susi, semenjak Anda diumumkan menjadi menteri, nama Ibu mumbul tinggi sekali. Tiba-tiba dunia media sosial geger. Banyak sekali yang mencerca Anda, mulai dari perceraian, tatoan, rambut dicat merah, merokok dll. Semua seakan menjadi orang paling mulia di dunia dengan cara membuat nista manusia lain. Memang ada, jenis orang yang ingin diri mereka suci sembari terus berdoa dan berharap ada banyak orang kotor supaya mereka tampak suci. Dan di sini, di negeri kita ini, jumlah mereka banyak sekali.

Bu, saya juga perokok, sama seperti Anda. Saya tidak punya tato, tapi banyak teman-teman saya yang bertato. Kapan-kapan, kalau ada kesempatan saya ingin memperkenalkan Anda dengan Rahung Nasution dan Bob Sick. Rahung menato tubuhnya karena ia tahu bahwa tato punya sejarah sosial yang panjang di negeri ini. Sedangkan Bob menato dirinya karena ia seorang seniman yang percaya bahwa tubuh bisa jadi galeri seni yang otentik. Perihal tato pasti susah dipahami oleh para pencaci Anda, karena kutil, kadas, panu, yang ada di hati mereka susah sekali dibersihkan. Sehingga fitnah dan dengki cepat tumbuh subur di hati mereka.

Bu Susi, saya tahu Anda tidak akan terganggu dengan cacian orang hanya karena merokok. Orang sekuat Anda, yang pernah bertahun-tahun berada paling tidak 15 jam per hari di atas truk pengangkut ikan, pasti hanya akan tersenyum simpul dengan ejekan khas kaum pekok manja nan lebay macam itu. Orang-orang hipokrit macam itu lebih suka mengejek orang yang bercerai dan malah kagum dengan orang-orang yang korup lalu memakai sebagian kecil uang korupsi itu untuk mendapatkan pustun. Bagi mereka, jualan ikan dianggap tidak berprestasi karena merasa lebih mulia korupsi impor sapi. Dan bagi mereka, punya bisnis pesawat terbang tidak perlu dihargai sebab ada cara yang mudah untuk mendapatkan uang dengan menggangsir uang haji.

Tapi negeri ini tidak melulu berisi manusia pencaci yang volume otak mereka sebesar biji sawi. Ada banyak orang yang berharap justru Anda tampil apa adanya. Merokok ya merokok saja. Merokok bukan perbuatan kriminal karena mengonsumsi barang legal, jadi tidak perlu sembunyi-sembunyi. Justru banyak orang yang merindukan hal seperti itu. Era pencitraan dan pesolek media biarlah berlalu bersama presiden terdahulu. Kalau Anda ingin menambah tato, tambah saja sebanyak yang Ibu suka. Saya bisa merekomendasikan seniman tato yang menurut saya keren.

Jadi begitulah, Bu Susi... Sungguh semua itu ingin saya sampaikan jika kita bisa ngopi bareng, sembari merokok dan merasakan segarnya angin laut. Saya yakin, mengurus ikan teri jauh lebih bermanfaat dan mulia daripada mengurus para pencaci.

Saya menunggu sepak-terjang Anda. Ke depan, kehidupan nelayan akan semakin sulit karena BBM akan naik. Belum lagi pencuri-pencuri ikan dari luar negeri yang terus dilindungi di negeri ini, ditambah soal pencemaran laut, abrasi, dan sekian tumpuk masalah di laut kita tercinta ini.

Selebihnya, biarkan para pencaci tetap menggonggong, bercericit dan mengembik. Begitulah memang nasib para pecundang. Kapan-kapan kalau ada waktu, biar tubuh mereka ditato secara alamiah oleh gigi hiu di laut Arafuru.

Lampiran 20. Cak Nun, Iqbal Aji Daryono, dan Mojok

Cak Nun, Iqbal Aji Daryono, dan Mojok

Sebentar, jamaah Maiyah harap jangan naik pitam dulu. Jangan protes dulu: “Cak Nun kok disejajarkan dengan Iqbal, situ ngajak gejeran?”

Untuk mendinginkan hati Anda, saya bagi informasi yang penting: Iqbal Aji Daryono adalah jamaah Maiyah. Valid. Kalau sedang berada di Yogya, Iqbal bisa ditemui di kerumunan jamaah Maiyah di Kasihan, Bantul, setiap tanggal 17 malam. Sampai pagi. Sambil sesekali berjalan ke sana kemari, berharap ada orang yang mengenali dirinya lalu mengajaknya foto bersama. Dalam hal diajak foto bersama para penggemarnya, Iqbal agak lebih kalem dibanding Agus Mulyadi. Kalau Agus menghitung dalam satu acara berapa kali diajak foto bersama.

Keesokan harinya, Agus akan bilang, “Asu, semalam yang ngajak foto aku

20 orang tapi yang mengunggah di Facebook cuma 2 orang.” Agus lupa bahwa foto orang memang sudah tidak bisa dipakai menakut-nakuti maling, tapi setidaknya bisa untuk menakut-nakuti tikus.

Sudah tentu, Iqbal adalah adalah penggemar berat Cak Nun. “Kalau di India, mungkin Cak Nun sudah jadi nabi, dan punya sekte sendiri.” ujarnya suatu saat ketika bertemu saya di acara Maiyah.

Cak Nun adalah penulis esai produktif. Mungkin paling produktif di antara penulis esai yang ada di Indonesia. Tahun lalu, lewat akun Twitternya, Radio Buku menyatakan kalau setidaknya Cak Nun telah menulis 5.000an esai. Itu yang terdokumentasi. Pasti ada yang nyelip tak terdokumentasi dengan baik. Dan bisa jadi itu banyak sekali. Jumlah sebanyak itu belum termasuk esai-esai anyarnya yang disebar lewat Whatsapp maupun lewat situsweb caknun.com.

Konon, di era ketika namanya melambung, semua media massa mengantre tulisan Cak Nun. Dalam semalam, dia bisa menulis lebih dari 5 esai. Namanya saat itu adalah jaminan keterbacaan yang tinggi. Koran dan majalah memburunya untuk menaikkan oplah.

Iqbal saat ini termasuk penulis yang paling banyak diburu media massa baik cetak maupun online. Setidaknya, jika dia mau, belasan media siap menampung tulisannya setiap minggu. “Enak dong, Bal,” komentar saya waktu dia curhat sambil setengah pamer kepada saya.

Dengan cengengesan dia menjawab, “Kalau bisa menulis sebanyak itu, ya enak. Aku bisa bikin rumah lagi. Malah bisa menikah lagi.” Tentu saja kalimat terakhir itu tambahan dari saya.

Dan ini informasi yang sangat penting. Sekali lagi sangat penting. Semua media massa yang menawari Iqbal menulis, selalu dengan pesan khusus, “Tulislah esai yang seperti Mojok, Mas Iqbal...”

Seperti Mojok. Seperti Mojok. Ya. Seperti Mojok.

Secara kuantitas tentu saja Iqbal belum bisa dibandingkan dengan Cak Nun. Tapi keduanya hidup di era pembaca yang berbeda. Cak Nun muncul dari media cetak. Iqbal mengerek bendera di era ketika media digital tumbuh, dan ketika Facebook menjadi andalan untuk membangun brand.

Cak Nun mulai berkilau di tahun 70an, Iqbal di tahun 2010. Beda 40 tahun. Sama dengan usia saya.

Lagi-lagi, jangan marah dulu para jamaah Maiyah... Tentu sampai sekarang, di era serbadigital, Cak Nun juga masih dan makin mengilap. Satu tayangan Cak Nun di Youtube saja bisa diunggah belasan akun. Isinya sama. Itu menegaskan bahwa pamor Cak Nun sebagai tokoh masih mencorong.

Apa poin dari semua itu? Begini... Sebagai Kepala Suku Mojok, saya sering ditanya: Bagaimana merancang Mojok dengan gaya penulisan yang baru?

Sepintas pertanyaan itu sepertinya membanggakan. Tapi sesungguhnya menyedihkan. Itu tanda bahwa ada banyak orang yang tidak melihat sejarah dengan baik. Esai-esai seperti di Mojok sesungguhnya sudah banyak bermunculan sejak dulu. Umar Kayam, Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, Bondan Winarno, Mahbub Djunaidi, dan masih banyak penulis lain, yang menulis esai-esai yang lentur, penuh sanepo, satir, dan tangkas. Jadi, Mojok bukan merancang dari nol. Hanya saja, Mojok hadir dalam situasi ketika media sosial sudah bisa menjadi rujukan atas tulisan yang bagus dan tidak.

Media sosial, utamanya Facebook, jelas punya kelenturan dan keleluasaan tersendiri. Bahasanya bisa campuran, cengengesannya bisa berlebihan, pisuhan bisa dilontarkan. Mojok tetap tidak punya masalah dengan itu. Media massa lain mungkin mikir. Atau misalnya ketika Arman Dhani (yang masih bisa menulis bagus itu lho, sekalipun sudah terkenal, kaya, dan punya pacar) meliuk-liuk memaparkan argumennya secara logis, namun diakhiri dengan, “Ayo kita balen, Dik...” Mojok tidak mau menyunting yang seperti itu. Biar saja. Karena asyik.

Mojok tidak hadir di ruang hampa. Steril. Bahkan penulis-penulis Mojok punya rujukan penulis-penulis lain. Agus adalah penggila berat tulisan-tulisan Umar Kayam. Arlian Buana penggemar tulisan-tulisan Mahbub Djunaidi. Iqbal jelas, pengagum Cak Nun. Dhani pencinta Catatan Pinggir Goenawan Mohamad. Dhani boleh sangar dalam tulisan-tulisannya, tapi bertemu begawan Salihara itu, dengkulnya gemetar. Mestinya dia melakukan wawancara, tapi malah menyodorkan lengan kanannya, “Pak, bolehkah tandatangan di lengan saya? Mau saya bikin tato...” Sudah tentu itu pelintiran dari saya. Sebab yang benar, dia

membuka ranselnya, lalu mengeluarkan belasan jilid buku karya Goenawan Mohamad untuk minta tandatangan. Agenda wawancara buyar.

Sebagai penulis, sekalipun tidak sehebat nama-nama yang saya sebut di atas, saya sering agak sedih kalau seorang penulis dianggap tidak punya kesinambungan sejarah dengan penulis-penulis sebelumnya. Bahwa sebagai manusia kreatif mereka memberikan sentuhan yang berbeda, tentu begitulah harusnya.

Jadi begitu. Jangan tanya lagi soal Mojok yang merancang konten yang benar-benar baru ya...

Puja-puji tidak membahagiakan kami. Basa-basi tak bisa lagi menghibur saya. Hanya ranking Alexa yang bisa.

